



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA
JURUSAN AKUNTANSI**

Jalan Sriwijaya Negara, Palembang 30139
Telp. 0711-353414 Fax. 0711-355918

Website : www.polisriwijaya.ac.id E-mail : info@polsri.ac.id



Hal : Surat Pengantar Pengambilan Data

Palembang, 26 Maret 2023

Kepada

Yth. Wakil Direktur 1
Politeknik Negeri Sriwijaya

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan ketetapan kurikulum yang berlaku di Politeknik Negeri Sriwijaya, saya mahasiswa Jurusan Akuntansi Semester VI merencanakan untuk melaksanakan pengambilan data di **CV Muda Ria** guna penulisan Laporan Akhir.

Guna melaksanakan kegiatan penelitian dan pengambilan data tersebut maka saya mengajukan permohonan kepada Wakil Direktur 1 Politeknik Negeri Sriwijaya untuk memberikan surat pengantar untuk saya memperlancar kegiatan tersebut.

Saya Mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan tersebut adalah :

No.	Nama	NPM	Kelas
1.	Muhammad Refki Maliki	062130501301	6 AB

Selanjutnya surat permohonan tersebut ditunjukkan kepada:

Tujuan : Pimpinan CV Muda Ria

Instansi : CV Muda Ria

Alamat : Dusun 1 Desa Simpang Nibung Rawas, Sungai Jauh, Rawas Ulu - Kab.
Musi Rawas Utara

Atas perhatian dan kebijakannya, kami ucapkan terima kasih

Mengetahui,

Ketua Jurusan Akuntansi
a.n Sekretaris Jurusan Akuntansi

Yuliana Sari, S.E., MBA., Ak., CA.
NIP 197707292008012015

Hormat Saya,

Muhammad Refki Maliki
NPM 062130501301



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA

Jalan Srijaya Negara Bukit Besar – Palembang 30139 Telepon (0711) 353414
Laman : <http://polsri.ac.id>, Pos El : info@polsri.ac.id

Nomor : 3311/PL6.3.1/SP/2024
Perihal : Izin Pengambilan Data

28 Maret 2024

Yth. Pimpinan
CV. Muda Ria
Dusun I Desa Simpang Nibung Rawas
Sungai Jauh Rawas Ulu
Kabupaten Musi Rawas Utara

Dengan hormat,

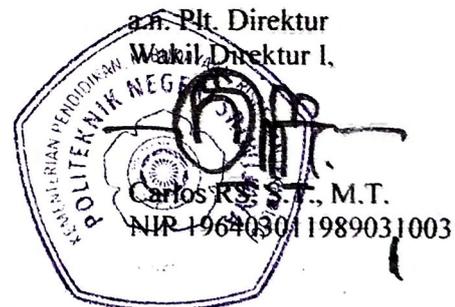
Sesuai dengan kurikulum Jurusan Akuntansi pada Politeknik Negeri Sriwijaya, Laporan Akhir merupakan mata kuliah wajib pada semester 6 (enam). Untuk itu mahasiswa kami memerlukan data untuk penyusunan Laporan Akhir tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami mohon Bapak/Ibu dapat memberikan izin dan membantu mahasiswa kami ini untuk pengambilan data.

Mahasiswa kami yang akan mengumpulkan data tersebut adalah :

No	Nama	NPM	Kelas	Jurusan / Program Studi
1	Muhammad Refki Maliki	0621 3050 1301	6 AB	Akuntansi

Atas perhatian dan bantuannya diucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. Plt. Direktur
2. Ketua Jurusan Akuntansi
3. Yang bersangkutan
4. Arsip

MS.Word/D/AD/Dw



MDR

CV MUDA RIA

Dusun I Desa Simpang Nibung Rawas Sungai Jauh Rawas Ulu -
Kabupaten Musi Rawas Utara
Telp. 081215409074 Email : arifingraha@gmail.com

Palembang, 22 April 2024

Lampiran : -

Hal : Persetujuan Pengambilan Data

Yth. Wakil Direktur I

Politeknik Negeri Sriwijaya

Jln. Srijaya Negara Bukit Besar

Palembang

Dengan hormat,

Sehubungan dengan surat No. 3311/PL6.3.1/SP/2024 tanggal 28 Maret 2024, perihal permohonan pengambilan data oleh Mahasiswa Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Sriwijaya di CV Muda Ria Kabupaten Musi Rawas Utara yang mana data tersebut digunakan untuk penyusunan Laporan Akhir semester 6 (enam). Adapun mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Muhammad Refki Maliki

NPM : 062130501301

Kelas : 6AB

Jurusan : Akuntansi

Berkenaan dengan hal tersebut di atas maka dengan ini kami dari CV Muda Ria Kabupaten Musi Rawas Utara memberikan izin untuk melakukan pengambilan data yang dibutuhkan guna penyusunan Laporan Akhir dengan ketentuan data hanya digunakan sebagai penyusunan Laporan Akhir saja dan tidak disalahgunakan.

Demikian surat ini kami sampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, atas perhatian dan kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,



Winda
Direktur

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,	
	RISET DAN TEKNOLOGI	
	POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA	
	JURUSAN AKUNTANSI	
	Jalan Srijaya Negara, Palembang 30139	
	Telp: 0711-353414 Fax. 0711-355918	
	Website: www.polisriwijaya.ac.id E-mail: info@polsri.ac.id	
KESEPAKATAN BIMBINGAN LAPORAN AKHIR		

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Pihak Pertama

Nama : Muhammad Refki Maliki
NIM : 062130501301
Jurusan : Akuntansi
Program Studi : DIII Akuntansi

Pihak Kedua

Nama : Indra Satriawan, S.E., M.Si., Ak., CA.
NIP : 197211161999031001
Jurusan : Akuntansi
Program Studi : DIII Akuntansi

Pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 telah sepakat untuk melakukan konsultasi bimbingan Laporan Akhir.

Konsultasi bimbingan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu minggu.
Pelaksanaan bimbingan pada setiap hari Selasa pukul 09.30 WIB s/d selesai, tempat di Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Sriwijaya.
Demikian kesepakatan ini dibuat dengan penuh kesadaran guna kelancaran penyelesaian Laporan Akhir.

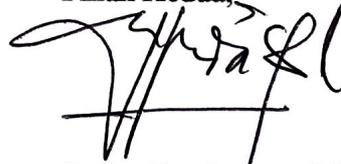
Pihak Pertama,



Muhammad Refki Maliki
NIM 062130501301

Palembang, 30 Januari 2024

Pihak Kedua,



Indra Satriawan, S.E., M.Si., Ak., CA.
NIP 197211161999031001

Mengetahui,
Ketua Jurusan Akuntansi,



Dr. Evada Dewata, S.E., M.Si., Ak., CA., CMA.
NIP 197806222003122001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA
JURUSAN AKUNTANSI

Jalan Srijaya Negara, Palembang 30139

Telp: 0711-353414 Fax. 0711-355918

Website: www.polisriwijaya.ac.id E-mail: info@polsri.ac.id



KESEPAKATAN BIMBINGAN LAPORAN AKHIR

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Pihak Pertama

Nama : Muhammad Refki Maliki
NIM : 062130501301
Jurusan : Akuntansi
Program Studi : DIII Akuntansi

Pihak Kedua

Nama : Riza Wahyudi, S.E., M.M., Ak., CA.
NIP : 197007182001121001
Jurusan : Akuntansi
Program Studi : DIII Akuntansi

Pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2024 telah sepakat untuk melakukan konsultasi bimbingan Laporan Akhir.

Konsultasi bimbingan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu minggu.
Pelaksanaan bimbingan pada setiap hari Rabu pukul 09.30 WIB s/d selesai, tempat di Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Sriwijaya.
Demikian kesepakatan ini dibuat dengan penuh kesadaran guna kelancaran penyelesaian Laporan Akhir.

Pihak Pertama,

Palembang, 07 Februari 2024

Pihak Kedua,


Muhammad Refki Maliki
NIM 062130501301


Riza Wahyudi, S.E., M.M., Ak., CA.
NIP 197007182001121001

Mengetahui,
Ketua Jurusan Akuntansi,


Dr. Evada Dewata, S.E., M.Si., Ak., CA., CMA.
NIP 197806222003122001



KEMENTERIAN, PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA
JURUSAN AKUNTANSI

Jalan Sriwijaya Negara Bukit Besar – Palembang 30139 Telepon (0711) 353414
Laman : <http://polsri.ac.id>, Pos El : info@polsri.ac.id



LEMBAR KONSULTASI BIMBINGAN LAPORAN AKHIR

Nama : Muhammad Refki Maliki
NIM : 062130501301
Jurusan/Program Studi : Akuntansi/DIII Akuntansi
Judul Laporan Akhir : Penerapan Perhitungan PPh Pasal 21
Sebelum dan Sesudah PP 58/PMK 168 Tahun 2023
Terhadap Karyawan Tetap pada CV Muda Ria
Pembimbing I : Indra Satriawan, S.E., M.Si., Ak., CA.

No.	Tanggal	Uraian Bimbingan	Tanda Tangan Pembimbing
1	30 Januari 2024	Pengajuan judul & Ace judul	
2	03 Februari 2024	Pengajuan proposal	
3	13 Februari 2024	Perbaikan proposal	
4	15 Maret 2024	Perbaikan proposal	
5	20 Maret 2024	ACC proposal	
6	27 Maret 2024	Pengajuan Bab 1	
7	28 Maret 2024	Pengajuan Bab 2	
8	03 April 2024	Pengajuan Bab 3	
9	17 April 2024	Perbaikan Bab 1	
10	19 April 2024	Perbaikan Bab 2 & 3	
11	25 April 2024	ACC Bab 1	
12	26 April 2024	ACC Bab 2	
13	30 April 2024	ACC Bab 3	
14	02 Mei 2024	Pengajuan Bab 4	

Palembang, 30 Januari 2024
Ketua Jurusan Akuntansi,

Dr. Evada Dewata, S.E., M.Si., Ak., CA., CMA.
NIP 197806222003122001



KEMENTERIAN, PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA
JURUSAN AKUNTANSI

Jalan Srijaya Negara Bukit Besar – Palembang 30139 Telepon (0711) 353414
Laman : <http://polsri.ac.id>, Pos El : info@polsri.ac.id



LEMBAR KONSULTASI BIMBINGAN LAPORAN AKHIR

Nama : Muhammad Refki Maliki
NIM : 062130501301
Jurusan/Program Studi : Akuntansi/DIII Akuntansi
Judul Laporan Akhir : Penerapan Perhitungan PPh Pasal 21
Sebelum dan Sesudah PP 58/PMK 168 Tahun 2023
Terhadap Karyawan Tetap pada CV Muda Ria
Pembimbing II : Riza Wahyudi, S.E., M.M., Ak., CA.

No.	Tanggal	Uraian Bimbingan	Tanda Tangan Pembimbing
1	07 Februari 2024	Pengajuan Judul	<i>Rizka</i>
2	12 Februari 2024	ACC Judul	<i>Rizka</i>
3	02 Mei 2024	Pengajuan Proposal	<i>Rizka</i>
4	06 Mei 2024	Perbaikan Proposal	<i>Rizka</i>
5	13 Mei 2024	Perbaikan Proposal	<i>Rizka</i>
6	26 Mei 2024	ACC Proposal	<i>Rizka</i>
7	27 Mei 2024	Pengajuan Bab 1 & 3	<i>Rizka</i>
8	29 Mei 2024	ACC Bab 1, Bab 2, Bab 3	<i>Rizka</i>
9	13 Juni 2024	Pengajuan Bab 4	<i>Rizka</i>
10	19 Juni 2024	Perbaikan Bab 4	<i>Rizka</i>
11	14 Juni 2024	Pengajuan Bab 5	<i>Rizka</i>
12	15 Juni 2024	ACC Bab 5	<i>Rizka</i>
13	25 Juni 2024	ACC Laporan Akhir	<i>Rizka</i>

Palembang, 07 Februari 2024
Ketua Jurusan Akuntansi,

Dr. Evada Dewata, S.E., M.Si., Ak., CA., CMA.
NIP 197806222003122001



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA
JURUSAN AKUNTANSI**

Jalan Srijaya Negara, Palembang 30139

Telp: 0711-353414 Fax. 0711-355918

Website: www.polisriwijaya.ac.id E-mail: info@polsri.ac.id



LEMBAR KUNJUNGAN MAHASISWA

Nama : Muhammad Refki Maliki
NIM : 062130501301
Mata Kuliah : Perpajakan
Pembimbing : 1. Indra Satriawan, S.E., M.Si., Ak., CA.
2. Riza Wahyudi, S.E., M.M., Ak., CA.
Nama Perusahaan : CV Muda Ria

No.	Tanggal	Keterangan	Tanda Tangan dan Cap
1.	30 Maret 2024	Mengantar dan mengajukan surat izin pengambilan data	
2.	27 April 2024	Mengambil surat persetujuan	
3.	27 April 2024	Wawancara dan observasi data	
4.	11 Mei 2024	Pengambilan data	
5.	25 Mei 2024	Pengambilan data	
6.	25 Mei 2024	Cap dan Tanda Tangan	

Pembimbing I,

Indra Satriawan, S.E., M.Si., Ak., CA.
NIP 197211161999031001

Pembimbing II,

Riza Wahyudi, S.E., M.M., Ak., CA.
NIP 197007182001121001

Mengetahui,
Ketua Jurusan Akuntansi,

Dr. Evada Dewata, S.E., M.Si., Ak., CA., CMA.
NIP 197806222003122001

HASIL WAWANCARA

No Wawancara	:	1
Narasumber/Status	:	Wirda (W)/Direktur CV Muda Ria
Pewawancara	:	Muhammad Refki Maliki (MRM)
Perihal	:	Penerapan Perhitungan PPh Pasal 21 Sebelum dan Sesudah PP 58/PMK 168 Tahun 2023 Terhadap Karyawan Tetap pada CV Muda Ria
Tipe Wawancara	:	Terstruktur dan Tidak Terstruktur
Hari/Tanggal	:	Sabtu/30 Maret 2024
Waktu	:	16:00
Lokasi	:	Dusun 1 Desa Simpang Nibung Rawas, Sungai Jauh, Rawas Ulu - Kab. Musi Rawas Utara
Suasana	:	MRM berangkat dari kota Palembang pukul 08:00 dan tiba di Musi Rawas Utara pukul 15:30 kemudian sampai di lokasi CV Muda Ria pukul 15:55. Cuaca pada saat itu panas dan bermatahari. Hal pertama yang dilakukan adalah bertanya kepada satpam CV Muda Ria untuk menanyakan dimana W selaku Direktur CV Muda Ria. Tak lama dari itu, satpam menelpon W dan keluar dari rumah kantor. Sedikit basa-basi dilakukan sebelum memohon izin untuk melakukan wawancara.

Inisial		Transkrip	Kata Kunci
MRM	:	Okey eh Assalamualaikum bu, ini aku nak nanyo mengenai pajak perusahaan.	
W	:	Waalaikumsalam boleh ki.	
MRM	:	Nah pajak perusahaan ni apo be buk yang dilapor CV Muda Ria nih buk?	
W	:	Biasonyo kami ni PPN, teros PPh 23 atas jasa biasonyo kalu dak salah ke PT Cahaya Windu, teros tu apo lagi, samo pajak badan.	Perusahaan hanya melaksanakan kewajiban pelaporan PPN, PPh Pasal 23, dan PPh Badan.
MRM	:	Pajak badan eh ah ini kalu ini pasal 21 cakmano bu motong apo lapor dak Muda Ria ni bu?	
W	:	Noh men itu kami dak tau PPh Pasal 21.	Perusahaan tidak mengetahui adanya PPh Pasal 21.
MRM	:	Nah pasal 21 tu sebenernyo ini buk, pajak yang dikenoke atas gaji karyawan	

		kalu kito ngeluarke gaji, ontok bayar gaji karyawan itu biasonyo keno pasal 21 pajaknyo tapi kito etong dulu, nah ini ni perusahaan ini ni eh ngetong dak bu penghasilan teratur buk?	
W	:	Hmm belum tau itu ki.	Perhitungan penghasilan teratur belum dilakukan.
MRM	:	Kalu teratur tu mencak gaji pokok bu, gaji pokok nyo tu sebulan eh tiap bulan dio tu tiap bulan samo, misalnya Rp1.000.000 nih tiap bulan, bulan Januari Rp1.000.000 Februari Rp1.000.000 jugo, nah cak itu bu kalu penghasilan teratur, nah kalu penghasilan tidak teratur samo jugo yo bu belum ngetong jugo?	
W	:	Belom jugo.	Perhitungan penghasilan tidak teratur belum dilakukan
MRM	:	Nah itu kalu dak teratur mencak kito tu ngebageke THR, bonus cak itu na buk dio dio tu sebulan itulah gaji dio tu yang keno tu. Nah kalu ontok penghasilan bruto jugo belum yo bu?.	
W	:	Belom jugo men perusahaan ini.	Perhitungan penghasilan bruto belum dilakukan.
MRM	:	Nah kalo ngetong biaya jabatan?	
W	:	Belom jugo ki itu ibu dak tau hehehe.	Perhitungan biaya jabatan belum dilakukan.
MRM	:	Iyo yosudah berarti, kalu biaya jabatan tu dio tadi e pas kito ngetong penghasilan bruto, itu kito kali 5%, jadi misal penghasilan bruto kito si karyawan itu Rp20.000.000 dikali 5% sekian, nah itu biaya jabatannyo bu. Nah kalu untuk neto penghasilan neto buk, jugo belum bu yo?	
W	:	Belom jugo, berarti neto itu bersih yo ki?	Perhitungan penghasilan neto belum dilakukan.
MRM	:	Iyo kalu penghasilan neto tu dio, yang tadi bruto kan kotor tadi, dikurangi	

		dengan biaya jabatan, nah jugo ado pengurangan lagi, ado pengurangan iuran-iuran eh jaminan pensiun teros tu hari tuo jaminan hari tuo ibarat tu perusahaan melok program BPJS. Nah kalau ini PTKP buk tau dak buk PTKP tu apo buk?	
W	:	Dak tau jugo ibu PTKP tu apo dio itu.	Perhitungan penghasilan tidak kena pajak belum dilakukan.
MRM	:	Nah itulah eheh jadi perusahaan ni belum e belum ngetong PTKP jugo, oke jadi, kalau penghasilan kena pajak?	
W	:	Noh apolagi itu, belum belum tau nian.	Perhitungan penghasilan kena pajak belum dilakukan.
MRM	:	Kalu tarif nyo jugo tau dak berarti?	
W	:	Iyo dak tau jugo, nah banyak nian dak tau nyo nih.	Perhitungan tarif pajak penghasilan pasal 21 belum dilakukan.
MRM	:	Nah kalau itu berarti memang belum nian ngetong pasal 21 ni berarti di perusahaan ini, berarti belum paham jugo peraturan pajak buk eh pasal 21 ni?	
W	:	Belom paham ki.	Tidak memahami peraturan perpajakan mengenai tata cara perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan pasal 21.
MRM	:	Nah kemaren sempet keno ini dak bu, keno dendo pajak dak yang berkaitan dengan pasal 21?	
W	:	Ado, kemaren dapet kabar dari arifin katonyo kito keno dendo pajak pasal 21 ni Rp100.000 sejak tahun 2020 berarti kagak bakalan keno dendo jugo yo untuk tahun 2021 dan seterusnya?	Dampak apabila belum melakukan perhitungan adalah akan dikenakan sanksi perpajakan.
MRM	:	Iyo itu, jadi kalau kito idak ngelapor, idakdo motong nah e, dak do ngelapor itu pasti buk keno dendo Rp100.000,	

		walaupun idak dilakuke pemeriksaan pajak, idakdo kito, idakdo dilakuke apo tuh em merikso-merikso dokumen cak itu na bu pemeriksaan pajak tu, nah itu bakalan keno dendo jugo melalui SP2DK biasonyo. Nah eh kiro-kiro bu kalo misalnya eh, penteng dak ngetong pasal 21 tu buk?	
W	:	Penting nian ini, soalnya kami dak tau cakmano ngitung itu, jadi dak tegawe bingung jugo ibu ni sebab perusahaan kemaren keno dendo.	Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 sangat penting diperhitungkan untuk menentukan pajak yang akan dipotong.
MRM	:	Yo berarti ibu setuju dak bu kalau misalnya aku etongkela cak itu na pajak nyo pasal 21 ni? jadi bantu-bantu perusahaan jugo kan cak itu.	
W	:	Ibuk setuju ki, supayo orosan pajak CV ini cepet selesai jugo kan. Harapannyo proses itungan kamu bener kan, uji cak uji Repki tadi mulai dari ngetong apo tadi, bruto apo.	Setuju untuk memperhitungkan pajak penghasilan pasal 21 berdasarkan undang-undang dan peraturan pajak yang berlaku. Sumber ide: Harus memperhitungkan penghasilan teratur, tidak teratur, bruto, biaya jabatan, penghasilan neto, penghasilan tidak kena pajak, penghasilan kena pajak, dan tarif pajak penghasilan pasal 21 untuk menentukan PPh Pasal 21 yang akan dipotong.
MRM	:	Makasih bu sebelumnya.	
W	:	Samo-samo.	

HASIL WAWANCARA

No Wawancara	:	2
Narasumber/Status	:	Arifin (A)/Komanditer CV Muda Ria
Pewawancara	:	Muhammad Refki Maliki (MRM)
Perihal	:	Penerapan Perhitungan PPh Pasal 21 Sebelum dan Sesudah PP 58/PMK 168 Tahun 2023 Terhadap Karyawan Tetap pada CV Muda Ria
Tipe Wawancara	:	Terstruktur dan Tidak Terstruktur
Hari/Tanggal	:	Sabtu/30 Maret 2024
Waktu	:	17:00
Lokasi	:	Dusun 1 Desa Simpang Nibung Rawas, Sungai Jauh, Rawas Ulu - Kab. Musi Rawas Utara
Suasana	:	Setelah MRM mewawancarai W selaku Direktur CV Muda Ria, kemudian MRM langsung menuju ruangan A selaku Komanditer CV Muda Ria sekitar jam 16:55. Cuaca saat itu mendung dan ditutupi awan. Hal pertama yang dilakukan adalah meminta izin kepada A untuk memasuki ruangannya terkait dengan wawancara.

Inisial		Transkrip	Kata Kunci
MRM	:	Assalamualaikum pak, nah Refki nak betanyo pak tadi sebelumnya sudah nanyo ke bu Wirda tentang pajak.	
A	:	Waalaiikumsalam Warrahmatullahi Wabarokatuh, apo kabar ki la lamo dak nyingok kau ini mase apo kuliah tu?	
MRM	:	Hahah baik pak alhamdulillah maseh, ini lah aku kesini ni nak mintak data untuk laporan akhir pak, nah Refki ni nak nanyo tentang pasal 21 perusahaan ini PPh sebenarnya Muda Ria ni belum pak yo motong samo lapor PPh Pasal 21?	
A	:	Kalu untuk perusahaan ini belum, ado beberapa perusahaan laen yang aku jadi pengorosnyo sudah, tapi bukan aku yang nganukenyo mereka ado konsultan, aku ni sebagai komisarisyono bae.	Pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 21 belum dilakukan.
MRM	:	Oh komisarisyono, oh berarti belum pak eh ngetong cak apo penghasilan teraturnyo mencak gaji pokok, tunjangan-tunjangan cak itu nah yang sifatnyono tu tetep dio tu?	

A	:	Belom ki belom.	Perhitungan penghasilan teratur belum dilakukan.
MRM	:	Teros kalo dak teratur jugo belom pak eh?	
A	:	Belom jugo.	Perhitungan penghasilan tidak teratur belum dilakukan.
MRM	:	Berarti kalu penghasilan bruto jugo belom berarti pak eh?	
A	:	Nah itu belom jugo ki penghasilan bruto.	Perhitungan penghasilan bruto belum dilakukan.
MRM	:	Kalu biaya jabatan jugo belom berarti?	
A	:	Biaya jabatan jugo belom ki.	Perhitungan biaya jabatan belum dilakukan.
MRM	:	Emm ini kalu neto penghasilan neto pak?	
A	:	Penghasilan bersih? Nah belom jugo.	Perhitungan penghasilan neto belum dilakukan.
MRM	:	Iyo pak bersihnyo jadi eh kalu bersih tu kan dio tadi yang bruto tadi yang kotor dikurang dengan biaya jabatan nah itu baru dapet penghasilan bersihnyo tadi. Nah kalu PTKP tau dak pak PTKP pak?	
A	:	Tau kalu PTKP bapak ki, tapi disini belom tau PTKP nyo ki. kagek aku pintakke be maseng-maseng status karyawannyo, agek aku ngomong samo bu Wirda.	Perhitungan penghasilan tidak kena pajak belum dilakukan.
MRM	:	Kalu kito ngetong penghasilan kena pajak pak?	
A	:	Belom jugo PKP ki.	Perhitungan penghasilan kena pajak belum dilakukan.
MRM	:	Hmm oh iyo, kalu tarif PPh Pasal 21 tau dak bapak? sekarang jugo ado peraturan baru pak ado tarif baru jugo.	
A	:	Belom ki, kalu dak salah yang progresif itu eh sam, yang naek teros itu na pokoknyo tarifnyo tu mencak cak pajak mobil tu na progresif.	Perhitungan tarif pajak penghasilan pasal 21 belum dilakukan.

MRM	:	Bener pak memang, tapi ado peraturan baru nah disitu eh namonyo Peraturan Pemerintah Nomor 58 taon 2023 disitu ado tarif baru pak namonyo tarif efektif rata-rata, kalu kito galak manggelnyo TER, TER singkatannyo tu.	
A	:	TER iyo oh itu ki, bapak dak pulok ngerti peraturan pajak pasal 21 ni paleng aku yang ngerti PPN karena kemaren bekasus kan, aku yang ngorosnyo jadi.	Tidak memahami peraturan perpajakan mengenai tata cara perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan pasal 21.
MRM	:	Nah berarti ado pemeriksaan sebelumnyo berarti di perusahaan ni pak?	
A	:	Ini lagi pemeriksaan ki untuk taon 2021, bapak ni kagek nak ke Palembang, rencanonyo ngurus laporan audit itu yang dipintak wong pajak.	Sedang dilakukan tindak pemeriksaan pajak pada tahun pajak 2021
MRM	:	La ilaha illallah pak, jadi makmano itu keno dendo apo pak?	
A	:	Belom men dendo ni dendo nyo, tapi dak tau ngapo kemaren tu dapet surat tagihan pajak Rp100.000 per taon 2020 gara-gara kito dak ngitung jadinya dak lapor pasal 21 tu.	Dampak apabila belum melakukan perhitungan adalah akan dikenakan sanksi perpajakan.
MRM	:	Iyo pak, jadi kalu tagihan pajak tu memang la keluar tanpa dilakuke pemeriksaan, walaupun SP2DK, SP2DK itula yang galak dikeluarke.	
A	:	Iyoo pas 2022 kemaren SP2DK cuma dak pernah pulok ditanggepi, itula keno perikso pajak ki.	Tidak pernah menanggapi SP2DK (Surat Permintaan Penjelasan Data dan Keterangan).
MRM	:	Oh berarti salah nian berarti kito ni pak, Iyola kagek kito evaluasi lah itu di perusahaan ini. Nah pak kiro-kiro menurut bapak penteng dak ado perhitungan-perhitungan terkait pasal 21 tadi?	

A	:	Penteng ki, sejar jugo dendonyo kalu kito dak ngitung samo dak lapor pasal 21.	Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 sangat penting diperhitungkan untuk menentukan pajak yang akan dipotong.
MRM	:	Ado nian, berarti setuju dak pak kalu aku itungke pasal 21 untuk perusahaan ini pak?	
A	:	Aku setuju bae ki, berarti kito ni harus ngitung yang awal tadi dari gaji pokok segalo macam itu.	Setuju untuk memperhitungkan pajak penghasilan pasal 21 berdasarkan undang-undang dan peraturan pajak yang berlaku. Sumber ide: Harus memperhitungkan penghasilan teratur, tidak teratur, bruto, biaya jabatan, penghasilan neto, penghasilan tidak kena pajak, penghasilan kena pajak, dan tarif pajak penghasilan pasal 21 untuk menentukan PPh Pasal 21 yang akan dipotong.
MRM	:	Iyo bener jadi kalu nak kito nak itung kan dari dari penghasilan teratur tadi sampe ke tarif tadi pak, kalo nak diomongke tadi, nah oke pak eh ini mokase pak sebelumnyo sudah ngeluangke kesempatannyo.	
A	:	Samo-samo ki, bapak mokasi jugo ye.	

HASIL WAWANCARA

No Wawancara	:	3
Narasumber/Status	:	Fikao (F)/Administrasi CV Muda Ria
Pewawancara	:	Muhammad Refki Maliki (MRM)
Perihal	:	Penerapan Perhitungan PPh Pasal 21 Sebelum dan Sesudah PP 58/PMK 168 Tahun 2023 Terhadap Karyawan Tetap pada CV Muda Ria
Tipe Wawancara	:	Terstruktur dan Tidak Terstruktur
Hari/Tanggal	:	Sabtu/27 April 2024
Waktu	:	15:45
Lokasi	:	Dusun 1 Desa Simpang Nibung Rawas, Sungai Jauh, Rawas Ulu - Kab. Musi Rawas Utara
Suasana	:	MRM berangkat dari kota Palembang pukul 07:50 dan sampai di lokasi CV Muda Ria pukul 15:30. Cuaca pada saat itu panas dan bermatahari. Hal pertama yang dilakukan adalah bertanya kepada satpam CV Muda Ria untuk menanyakan dimana W selaku pimpinan CV Muda Ria. Tak lama dari itu, satpam menelpon W dan keluar dari rumah kantor. MRM meminta izin kepada W untuk mewawancarai F selaku bagian administrasi CV Muda Ria.

Inisial		Transkrip	Kata Kunci
MRM	:	Assalamualaikum sore yuk, nak nanyo boleh kan yuk?	
F	:	Waalaikumsalam boleh kak.	
MRM	:	Nah eh kalo boleh tau yuk, di slip yang buat slip gaji karyawan ni ayuk eh?	
F	:	Iyo kak yang buat aku, eh aku meloki perintah bu Wirda be si sesuai yang dio enjok ke karyawan disini.	Sudah membuat dan mengeluarkan slip gaji karyawan pada saat penggajian.
MRM	:	Em nah disitu ado dak yuk pemotongan PPh Pasal 21 sebagai pengurang gaji cak itu, THR, tunjangan cak itu?	
F	:	Katek kak cuma total be men dak salah tuh.	Pemotongan PPh Pasal 21 tidak tertera di slip gaji.
MRM	:	Hm kalo perusahaan ni sebelum-sebelumnyo perusahaan ni sudah belum sebenernyo sudah belum ngelakuke perhitungan penghasilan teratur?	
F	:	Cakmano kak itu ngitungnyo aku jugo	Perhitungan

		dak tau si baru denger dari kakak nila.	penghasilan teratur belum dilakukan.
MRM	:	Oh kalau dak teratur jago belum?	
F	:	Nah perusahaan ni belum ngetong penghasilan teratur samo yang idak teratur.	Perhitungan penghasilan tidak teratur belum dilakukan.
MRM	:	Belom eh, kalau penghasilan bruto?	
F	:	Kalau penghasilan bruto jujur kak kami ni cakmano yo dak tau penghasilan bruto tu cakmano nah ngetongnyo.	Perhitungan penghasilan bruto belum dilakukan.
MRM	:	Kalau biaya jabatan jago dak tau ngitungnyo?	
F	:	Apolagi itu kak, dak paham aku.	Perhitungan biaya jabatan belum dilakukan.
MRM	:	Iyo kalau biaya jabatan tu kan eh setau aku 5% dari penghasilan bruto tadi, jadi kalau misalnya Rp10.000.000 dikali 5% berarti Rp500.000 kan, nah kalau penghasilan neto la tau belum penghasilan neto?	
F	:	Belom jago ngetong iyo belum.	Perhitungan penghasilan neto belum dilakukan.
MRM	:	Kalau ontok penghasilan neto tu iyo bersihnyo lah tadi kan bruto kan, kalau bruto tadi kotor nah dikurangi dengan biaya jabatan mungkin ado, perusahaan ado BPJS kan dikurangi tu dapet tu penghasilan netonyo. Nah kalau penghasilan tidak kena pajak po PTKP tau dak yuk?	
F	:	Aku ni tau dikit si kak, tapi eh kalau sepengalaman aku dulu begawe, di perusahaan laen tuh pernah ditanyoi la kawen lom teros la punyo anak belum, tapi tu men aku ni kan belum kawen makmano nak punyo anak kan berarti aku ni kan TK/0? tapi ni di perusahaan ini belum kak. Nah jadi tu aku baru tau si tulah eh ternyata tujuan HRD tu galak nanyo kito tu.	Perhitungan penghasilan tidak kena pajak belum dilakukan.
MRM	:	Iyo pacak iyoyo, biasanyo kalau diwawancara tu, pastilah ditanyoi itu. Jadi ayuk ni la berapa lamo disini yuk?	

F	:	Aku ni lah 1,5 tahun disini dari 2022, karena kemaren ado ini apo tu, kasus pajak men dak salah tu, nah perusahaan ini ni jugo keluargo aku, kalu dak salah sekarang ni dari pak arifin ngomong lagi pemeriksaan pajak tahun 2021, jadi aku ni disuruh lah buat nota masokke apo, ngerapike administrasi lah cak itu na dokumen iyo dokumen.	Sedang dilakukan tindak pemeriksaan pajak pada tahun pajak 2021.
MRM	:	Nah balek lagi yuk kalo ke PPh Pasal 21 tadi eh, kalu penghasilan kena pajak jugo belum eh perusahaan ngetong?	
F	:	Hm penghasilan kena pajak tu belum dietong kak.	Perhitungan penghasilan kena pajak belum dilakukan.
MRM	:	Eh tarif PPh Pasal 21 jugo dak tau berarti eh?	
F	:	Iyo dak tau jugo dan jugo kami belum ngetong tarifnyo.	Perhitungan tarif pajak penghasilan pasal 21 belum dilakukan.
MRM	:	Nah itutu sebenarnya yang aku sebotke tadi tu iyolah proses, eh cakmano lah caro kito ngetong PPh Pasal 21 tu, nah berarti perusahaan selamo inini belum paham berarti peraturan pajak tentang pasal 21 ni?	
F	:	Iyo kak, wong disini ni katek yang paham peraturan pajak, kalo ado caknyo idak keno kasus pajak ke kami ni kak.	Tidak memahami peraturan perpajakan mengenai tata cara perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan pasal 21.
MRM	:	Oh iyo kemaren kito keno dendo dak kalu pajak ni?	
F	:	Ado kak, kemaren tu aku ni disoro ke BNI samo pak arifin, untuk nyetorke apo yo, iyo duit ke pajak dendo nyo tu Rp100.000 kalo dak salah yo tentang pajak inila kak Rp100.000 kemaren tu.	Dampak apabila belum melakukan perhitungan adalah akan dikenakan sanksi perpajakan.
MRM	:	Oh iyo bener aku tadi pernah nanyo jugo eh tadi kemaren apo kemaren aku nanyo dengan pak arifin yo samo jawabannyo samo Rp100.000 jugo si keno, keno	

		dendo gara-gara ini. Men kito jingok kasus yang ado, teros tu dendo yang dikenoi, sudah dikenoi pajak, nah menurut ayuk penting dak, eh perhitungan pasal 21 ontok perusahaan	
F	:	Penting nian kak, ini kan kewajiban perusahaan amen uji kito tu, lah ado pulo undang-undangnyo, kalu dak dilakuke yo itula tadi resiko kagek kedepannyo nak cakmano lagi cak ituna.	Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 sangat penting diperhitungkan untuk menentukan pajak yang akan dipotong.
MRM	:	Hm bener itu sebenarnya, kalo misalnya aku etongke PPh Pasal 21 ni untuk perusahaan setuju dak cak itu setuju dak kagek sisonyo pacak aku ajari kan supayo pacak kan, pacak bantu pak arifin jugo yang ngorosi pajaknyo.	
F	:	Yo setuju lah kak, jadi yang tadi disebotke kakak tadi harus kito etong galo dulu eh baru apo baru pacak tau kan PPh 21 nyo sekian misalnya. Aku jugo nak belajar jugo ininih. Jadilah ilmu gratis kan dari kamu kak haha.	Setuju untuk memperhitungkan pajak penghasilan pasal 21 berdasarkan undang-undang dan peraturan pajak yang berlaku. Sumber ide: Harus memperhitungkan penghasilan teratur, tidak teratur, bruto, biaya jabatan, penghasilan neto, penghasilan tidak kena pajak, penghasilan kena pajak, dan tarif pajak penghasilan pasal 21 untuk menentukan PPh Pasal 21 yang akan dipotong.
MRM	:	Iyo bener-bener, okee yuk, mokase yuk kesempatannyo, nah itu tadi aku kagek mintaklah <i>scan</i> an gaji, slip gaji tadi samo kalo dak salah daftar karyawan tadi yuk, yang ado PTKP nyo, tadi kan ayuk lah tau kan PTKP kan, nah ontok aku etong kagek kan, mokase yuk sebelumnya.	

F	:	Yo samo-samo ki, agek aku kirimke lewat WA be eh gek eh gek aku ini P ke.	
MRM	:	Oke-oke yuk mokase yuk.	

**TABEL ANALISIS KODING MANUAL DENGAN TEMATIK ANALISIS
TEMA PENGHASILAN TERATUR**

TEMA BESAR	KATA KUNCI	KATEGORISASI	HASIL
Penghasilan Teratur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perhitungan penghasilan teratur belum dilakukan. 2. Tidak memahami peraturan perpajakan mengenai tata cara perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan pasal 21. 3. Dampak apabila belum melakukan perhitungan adalah akan dikenakan sanksi perpajakan. 4. Perhitungan penghasilan teratur sangat penting diperhitungkan. 5. Setuju untuk memperhitungkan penghasilan teratur berdasarkan undang-undang dan peraturan pajak yang berlaku. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perhitungan penghasilan teratur belum dilakukan. 2. Perhitungan penghasilan teratur sangat penting diperhitungkan. 3. Setuju untuk memperhitungkan penghasilan teratur berdasarkan undang-undang dan peraturan pajak yang berlaku. 	Dibutuhkannya penerapan perhitungan PPh Pasal 21 sebelum dan sesudah PP 58/PMK 168 Tahun 2023.

INTERPRETASI HASIL WAWANCARA

Berdasarkan hasil wawancara, perhitungan penghasilan teratur di CV Muda Ria saat ini belum dilakukan. Narasumber pertama menyatakan, *"hmm belum tau itu ki."* Narasumber kedua menambahkan, *"belum ki belum."* Narasumber ketiga juga mengatakan, *"cakmano kak itu ngitungnyo aku jugo dak tau si baru denger dari kakak nila."* Ketiga narasumber mengungkapkan bahwa belum dilakukannya perhitungan ini memiliki dampak yaitu akan dikenakan sanksi perpajakan. Narasumber pertama mengatakan *"ado, kemaren dapet kabar dari Arifin katonyo kito keno dendo pajak pasal 21 ni Rp100.000 sejak tahun 2020."* Narasumber kedua menegaskan, *"belum men dendo ni dendo nyo, tapi dak tau ngapo kemaren tu dapet surat tagihan pajak Rp100.000 per taon 2020 gara-gara kito dak ngitung jadinya dak lapor pasal 21 tu."* Narasumber ketiga menambahkan, *"ado kak, kemaren tu aku ni disoro ke BNI samo pak Arifin, untuk nyetorke apo yo, iyo duit"*

ke pajak dendo nyo tu Rp100.000 kalo dak salah yo tentang pajak inila kak Rp100.000 kemaren tu.”

Ketiga narasumber sepakat bahwa perhitungan penghasilan teratur sangat penting diperhitungkan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan perusahaan. Narasumber pertama menjelaskan, *“penting nian ini, soalnya kami dak tau cakmano ngitung itu, jadi dak tegawe bingung jugo ibu ni sebab perusahaan kemaren keno dendo.”* Narasumber kedua mendukung, *“penteng ki, sejar jugo dendonyo kalu kito dak ngitung samo dak lapor pasal 21.”* Narasumber ketiga juga setuju, *“penting nian kak, ini kan kewajiban perusahaan amen uji kito tu, lah ado pulo undang-undangnyo, kalu dak dilakuke yo itula tadi resiko kagek kedepannyo nak cakmano lagi cak ituna.”* Semua narasumber sangat merespon positif untuk memperhitungkan penghasilan teratur berdasarkan undang-undang dan peraturan pajak yang berlaku. Narasumber pertama setuju dengan pernyataan, *“ibuk setuju ki, supaya orosan pajak CV ini cepet selesai jugo kan. Harapannyo proses itungan kamu bener kan.”* Narasumber kedua juga berkomentar, *“aku setuju bae ki, berarti kito ni harus ngitung yang awal tadi dari gaji pokok segalo macem itu.”* Narasumber ketiga menyimpulkan, *“yo setuju lah kak, jadi yang tadi disebutke kakak tadi harus kito etong galo dulu eh baru apo baru pacak tau kan PPh 21 nyo sekian misalno.”*

Secara keseluruhan, ketiga narasumber menunjukkan bahwa belum dilakukannya perhitungan pajak penghasilan pasal 21 akan berdampak dikenakannya sanksi perpajakan yaitu denda keterlambatan pelaporan sebesar Rp100.000. Mereka sepakat bahwa perhitungan pajak penghasilan pasal 21 akan sangat membantu untuk menentukan besaran pajak penghasilan pasal 21 yang akan dipotong dan dibayarkan. Dengan demikian, ada kebutuhan mendesak untuk menghitung pajak penghasilan pasal 21 dalam pemenuhan kewajiban perpajakan perusahaan yang belum terpenuhi.

**TABEL ANALISIS KODING MANUAL DENGAN TEMATIK ANALISIS
TEMA PENGHASILAN TIDAK TERATUR**

TEMA BESAR	KATA KUNCI	KATEGORISASI	HASIL	
Penghasilan Teratur	Tidak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perhitungan penghasilan tidak teratur belum dilakukan. 2. Tidak memahami peraturan perpajakan mengenai tata cara perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan pasal 21. 3. Dampak apabila belum melakukan perhitungan adalah akan dikenakan sanksi perpajakan. 4. Perhitungan penghasilan tidak teratur sangat penting diperhitungkan. 5. Setuju untuk memperhitungkan penghasilan tidak teratur berdasarkan undang-undang dan peraturan pajak yang berlaku. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perhitungan penghasilan tidak teratur belum dilakukan. 2. Perhitungan penghasilan tidak teratur sangat penting diperhitungkan. 3. Setuju untuk memperhitungkan penghasilan tidak teratur berdasarkan undang-undang dan peraturan pajak yang berlaku. 	Dibutuhkannya penerapan perhitungan PPh Pasal 21 sebelum dan sesudah PP 58/PMK 168 Tahun 2023.

INTERPRETASI HASIL WAWANCARA

Berdasarkan hasil wawancara, perhitungan penghasilan tidak teratur di CV Muda Ria saat ini belum dilakukan. Narasumber pertama menyatakan, *"belum jugo."* Narasumber kedua menambahkan, *"belum jugo."* Narasumber ketiga juga mengatakan, *"nah perusahaan ni belum ngetong penghasilan idak teratur."* Ketiga narasumber mengungkapkan bahwa belum dilakukannya perhitungan ini memiliki dampak yaitu akan dikenakan sanksi perpajakan. Narasumber pertama mengatakan *"ado, kemaren dapet kabar dari Arifin katonyo kito keno dendo pajak pasal 21 ni Rp100.000 sejak tahun 2020."* Narasumber kedua menegaskan, *"belum men dendo ni dendo nyo, tapi dak tau ngapo kemaren tu dapet surat tagihan pajak Rp100.000 per taon 2020 gara-gara kito dak ngitung jadinya dak lapor pasal 21 tu."* Narasumber ketiga menambahkan, *"ado kak, kemaren tu aku ni disoro ke BNI samo pak Arifin, untuk nyetorke apo yo, iyo duit ke pajak dendo"*

nyo tu Rp100.000 kalo dak salah yo tentang pajak inila kak Rp100.000 kemaren tu.”

Ketiga narasumber sepakat bahwa perhitungan penghasilan tidak teratur sangat penting diperhitungkan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan perusahaan. Narasumber pertama menjelaskan, *“penting nian ini, soalnya kami dak tau cakmano ngitung itu, jadi dak tegawe bingung jugo ibu ni sebab perusahaan kemaren keno dendo.”* Narasumber kedua mendukung, *“penteng ki, sejar jugo dendonyo kalu kito dak ngitung samo dak lapor pasal 21.”* Narasumber ketiga juga setuju, *“penting nian kak, ini kan kewajiban perusahaan amen uji kito tu, lah ado pulo undang-undangnyo, kalu dak dilakuke yo itula tadi resiko kagek kedepannyo nak cakmano lagi cak ituna.”* Semua narasumber sangat merespon positif untuk memperhitungkan penghasilan tidak teratur berdasarkan undang-undang dan peraturan pajak yang berlaku. Narasumber pertama setuju dengan pernyataan, *“ibuk setuju ki, supaya orosan pajak CV ini cepet selesai jugo kan. Harapannyo proses itungan kamu bener kan.”* Narasumber kedua juga berkomentar, *“aku setuju bae ki, berarti kito ni harus ngitung yang awal tadi dari gaji pokok segalo macem itu.”* Narasumber ketiga menyimpulkan, *“yo setuju lah kak, jadi yang tadi disebotke kakak tadi harus kito etong galo dulu eh baru apo baru pacak tau kan PPh 21 nyo sekian misalnyo.”*

Secara keseluruhan, ketiga narasumber menunjukkan bahwa belum dilakukannya perhitungan pajak penghasilan pasal 21 akan berdampak dikenakannya sanksi perpajakan yaitu denda keterlambatan pelaporan sebesar Rp100.000. Mereka sepakat bahwa perhitungan pajak penghasilan pasal 21 akan sangat membantu untuk menentukan besaran pajak penghasilan pasal 21 yang akan dipotong dan dibayarkan. Dengan demikian, ada kebutuhan mendesak untuk menghitung pajak penghasilan pasal 21 dalam pemenuhan kewajiban perpajakan perusahaan yang belum terpenuhi.

**TABEL ANALISIS KODING MANUAL DENGAN TEMATIK ANALISIS
TEMA PENGHASILAN BRUTO**

TEMA BESAR	KATA KUNCI	KATEGORISASI	HASIL
Penghasilan Bruto	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perhitungan penghasilan bruto belum dilakukan. 2. Tidak memahami peraturan perpajakan mengenai tata cara perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan pasal 21. 3. Dampak apabila belum melakukan perhitungan adalah akan dikenakan sanksi perpajakan. 4. Perhitungan penghasilan bruto sangat penting diperhitungkan. 5. Setuju untuk memperhitungkan penghasilan bruto berdasarkan undang-undang dan peraturan pajak yang berlaku. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perhitungan penghasilan bruto belum dilakukan. 2. Perhitungan penghasilan bruto sangat penting diperhitungkan. 3. Setuju untuk memperhitungkan penghasilan bruto berdasarkan undang-undang dan peraturan pajak yang berlaku. 	Dibutuhkannya penerapan perhitungan PPh Pasal 21 sebelum dan sesudah PP 58/PMK 168 Tahun 2023.

INTERPRETASI HASIL WAWANCARA

Berdasarkan hasil wawancara, perhitungan penghasilan bruto di CV Muda Ria saat ini belum dilakukan. Narasumber pertama menyatakan, *"belum jugo men perusahaan ini."* Narasumber kedua menambahkan, *"nah itu belum jugo ki penghasilan bruto."* Narasumber ketiga juga mengatakan, *"kalo penghasilan bruto jujur kak kami ni cakmano yo dak tau penghasilan bruto tu cakmano nah ngetongnyo."* Ketiga narasumber mengungkapkan bahwa belum dilakukannya perhitungan ini memiliki dampak yaitu akan dikenakan sanksi perpajakan. Narasumber pertama mengatakan *"ado, kemaren dapet kabar dari Arifin katonyo kito keno dendo pajak pasal 21 ni Rp100.000 sejak tahun 2020."* Narasumber kedua menegaskan, *"belum men dendo ni dendo nyo, tapi dak tau ngapo kemaren tu dapet surat tagihan pajak Rp100.000 per taon 2020 gara-gara kito dak ngitung jadinya dak lapor pasal 21 tu."* Narasumber ketiga menambahkan, *"ado kak, kemaren tu aku ni disoro ke BNI samo pak Arifin, untuk nyetorke apo yo, iyo duit"*

ke pajak dendo nyo tu Rp100.000 kalo dak salah yo tentang pajak inila kak Rp100.000 kemaren tu.”

Ketiga narasumber sepakat bahwa perhitungan penghasilan bruto sangat penting diperhitungkan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan perusahaan. Narasumber pertama menjelaskan, *“penting nian ini, soalnya kami dak tau cakmano ngitung itu, jadi dak tegawe bingung jugo ibu ni sebab perusahaan kemaren keno dendo.”* Narasumber kedua mendukung, *“penteng ki, sejar jugo dendonyo kalu kito dak ngitung samo dak lapor pasal 21.”* Narasumber ketiga juga setuju, *“penting nian kak, ini kan kewajiban perusahaan amen uji kito tu, lah ado pulo undang-undangnyo, kalu dak dilakuke yo itula tadi resiko kagek kedepannyo nak cakmano lagi cak ituna.”* Semua narasumber sangat merespon positif untuk memperhitungkan penghasilan bruto berdasarkan undang-undang dan peraturan pajak yang berlaku. Narasumber pertama setuju dengan pernyataan, *“ibuk setuju ki, supayo orosan pajak CV ini cepet selesai jugo kan. Harapannyo proses itungan kamu bener kan.”* Narasumber kedua juga berkomentar, *“aku setuju bae ki, berarti kito ni harus ngitung yang awal tadi dari gaji pokok segalo macem itu.”* Narasumber ketiga menyimpulkan, *“yo setuju lah kak, jadi yang tadi disebutke kakak tadi harus kito etong galo dulu eh baru apo baru pacak tau kan PPh 21 nyo sekian misalno.”*

Secara keseluruhan, ketiga narasumber menunjukkan bahwa belum dilakukannya perhitungan pajak penghasilan pasal 21 akan berdampak dikenakannya sanksi perpajakan yaitu denda keterlambatan pelaporan sebesar Rp100.000. Mereka sepakat bahwa perhitungan pajak penghasilan pasal 21 akan sangat membantu untuk menentukan besaran pajak penghasilan pasal 21 yang akan dipotong dan dibayarkan. Dengan demikian, ada kebutuhan mendesak untuk menghitung pajak penghasilan pasal 21 dalam pemenuhan kewajiban perpajakan perusahaan yang belum terpenuhi.

**TABEL ANALISIS KODING MANUAL DENGAN TEMATIK ANALISIS
TEMA BIAYA JABATAN**

TEMA BESAR	KATA KUNCI	KATEGORISASI	HASIL
Biaya Jabatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perhitungan biaya jabatan belum dilakukan. 2. Tidak memahami peraturan perpajakan mengenai tata cara perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan pasal 21. 3. Dampak apabila belum melakukan perhitungan adalah akan dikenakan sanksi perpajakan. 4. Perhitungan biaya jabatan sangat penting diperhitungkan. 5. Setuju untuk memperhitungkan biaya jabatan berdasarkan undang-undang dan peraturan pajak yang berlaku. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perhitungan biaya jabatan belum dilakukan. 2. Perhitungan biaya jabatan sangat penting diperhitungkan. 3. Setuju untuk memperhitungkan biaya jabatan berdasarkan undang-undang dan peraturan pajak yang berlaku. 	Dibutuhkannya penerapan perhitungan PPh Pasal 21 sebelum dan sesudah PP 58/PMK 168 Tahun 2023.

INTERPRETASI HASIL WAWANCARA

Berdasarkan hasil wawancara, perhitungan biaya jabatan di CV Muda Ria saat ini belum dilakukan. Narasumber pertama menyatakan, *"belum jago ki itu ibu dak tau hehehe."* Narasumber kedua menambahkan, *"biaya jabatan jago belum ki."* Narasumber ketiga juga mengatakan, *"apolagi itu kak, dak paham aku."* Ketiga narasumber mengungkapkan bahwa belum dilakukannya perhitungan ini memiliki dampak yaitu akan dikenakan sanksi perpajakan. Narasumber pertama mengatakan *"ado, kemaren dapet kabar dari Arifin katonyo kito keno dendo pajak pasal 21 ni Rp100.000 sejak tahun 2020."* Narasumber kedua menegaskan, *"belum men dendo ni dendo nyo, tapi dak tau ngapo kemaren tu dapet surat tagihan pajak Rp100.000 per taon 2020 gara-gara kito dak ngitung jadinya dak lapor pasal 21 tu."* Narasumber ketiga menambahkan, *"ado kak, kemaren tu aku ni disoro ke BNI samo pak Arifin, untuk nyetorke apo yo, iyo duit ke pajak dendo"*

nyo tu Rp100.000 kalo dak salah yo tentang pajak inila kak Rp100.000 kemaren tu.”

Ketiga narasumber sepakat bahwa perhitungan penghasilan biaya jabatan sangat penting diperhitungkan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan perusahaan. Narasumber pertama menjelaskan, *“penting nian ini, soalnya kami dak tau cakmano ngitung itu, jadi dak tegawe bingung jugo ibu ni sebab perusahaan kemaren keno dendo.”* Narasumber kedua mendukung, *“penteng ki, sejar jugo dendonyo kalu kito dak ngitung samo dak lapor pasal 21.”* Narasumber ketiga juga setuju, *“penting nian kak, ini kan kewajiban perusahaan amen uji kito tu, lah ado pulo undang-undangnyo, kalu dak dilakuke yo itula tadi resiko kagek kedepannyo nak cakmano lagi cak ituna.”* Semua narasumber sangat merespon positif untuk memperhitungkan biaya jabatan berdasarkan undang-undang dan peraturan pajak yang berlaku. Narasumber pertama setuju dengan pernyataan, *“ibuk setuju ki, supaya orosan pajak CV ini cepet selesai jugo kan. Harapannyo proses itungan kamu bener kan.”* Narasumber kedua juga berkomentar, *“aku setuju bae ki, berarti kito ni harus ngitung yang awal tadi dari gaji pokok segalo macem itu.”* Narasumber ketiga menyimpulkan, *“yo setuju lah kak, jadi yang tadi disebutke kakak tadi harus kito etong galo dulu eh baru apo baru pacak tau kan PPh 21 nyo sekian misalno.”*

Secara keseluruhan, ketiga narasumber menunjukkan bahwa belum dilakukannya perhitungan pajak penghasilan pasal 21 akan berdampak dikenakannya sanksi perpajakan yaitu denda keterlambatan pelaporan sebesar Rp100.000. Mereka sepakat bahwa perhitungan pajak penghasilan pasal 21 akan sangat membantu untuk menentukan besaran pajak penghasilan pasal 21 yang akan dipotong dan dibayarkan. Dengan demikian, ada kebutuhan mendesak untuk menghitung pajak penghasilan pasal 21 dalam pemenuhan kewajiban perpajakan perusahaan yang belum terpenuhi.

**TABEL ANALISIS KODING MANUAL DENGAN TEMATIK ANALISIS
TEMA PENGHASILAN NETO**

TEMA BESAR	KATA KUNCI	KATEGORISASI	HASIL
Penghasilan Neto	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perhitungan penghasilan neto belum dilakukan. 2. Tidak memahami peraturan perpajakan mengenai tata cara perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan pasal 21. 3. Dampak apabila belum melakukan perhitungan adalah akan dikenakan sanksi perpajakan. 4. Perhitungan penghasilan neto sangat penting diperhitungkan. 5. Setuju untuk memperhitungkan penghasilan neto berdasarkan undang-undang dan peraturan pajak yang berlaku. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perhitungan penghasilan neto belum dilakukan. 2. Perhitungan penghasilan neto sangat penting diperhitungkan. 3. Setuju untuk memperhitungkan penghasilan neto berdasarkan undang-undang dan peraturan pajak yang berlaku. 	Dibutuhkannya penerapan perhitungan PPh Pasal 21 sebelum dan sesudah PP 58/PMK 168 Tahun 2023.

INTERPRETASI HASIL WAWANCARA

Berdasarkan hasil wawancara, perhitungan penghasilan neto di CV Muda Ria saat ini belum dilakukan. Narasumber pertama menyatakan, *"belum jugo, berarti neto itu bersih yo ki?"* Narasumber kedua menambahkan, *"penghasilan bersih? nah belum jugo."* Narasumber ketiga juga mengatakan, *"belum jugo ngetong iyo belum."* Ketiga narasumber mengungkapkan bahwa belum dilakukannya perhitungan ini memiliki dampak yaitu akan dikenakan sanksi perpajakan. Narasumber pertama mengatakan *"ado, kemaren dapet kabar dari Arifin katonyo kito keno dendo pajak pasal 21 ni Rp100.000 sejak tahun 2020."* Narasumber kedua menegaskan, *"belum men dendo ni dendo nyo, tapi dak tau ngapo kemaren tu dapet surat tagihan pajak Rp100.000 per taon 2020 gara-gara kito dak ngitung jadinya dak lapor pasal 21 tu."* Narasumber ketiga menambahkan, *"ado kak, kemaren tu aku ni disoro ke BNI samo pak Arifin, untuk*

nyetorke apo yo, iyo duit ke pajak dendo nyo tu Rp100.000 kalo dak salah yo tentang pajak inila kak Rp100.000 kemaren tu.”

Ketiga narasumber sepakat bahwa perhitungan penghasilan neto sangat penting diperhitungkan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan perusahaan. Narasumber pertama menjelaskan, *“penting nian ini, soalnya kami dak tau cakmano ngitung itu, jadi dak tegawe bingung jugo ibu ni sebab perusahaan kemaren keno dendo.”* Narasumber kedua mendukung, *“penteng ki, sejar jugo dendonyo kalu kito dak ngitung samo dak lapor pasal 21.”* Narasumber ketiga juga setuju, *“penting nian kak, ini kan kewajiban perusahaan amen uji kito tu, lah ado pulo undang-undangnyo, kalu dak dilakuke yo itula tadi resiko kagek kedepannyo nak cakmano lagi cak ituna.”* Semua narasumber sangat merespon positif untuk memperhitungkan penghasilan neto berdasarkan undang-undang dan peraturan pajak yang berlaku. Narasumber pertama setuju dengan pernyataan, *“ibuk setuju ki, supaya orosan pajak CV ini cepet selesai jugo kan. Harapannyo proses itungan kamu bener kan.”* Narasumber kedua juga berkomentar, *“aku setuju bae ki, berarti kito ni harus ngitung yang awal tadi dari gaji pokok segalo macem itu.”* Narasumber ketiga menyimpulkan, *“yo setuju lah kak, jadi yang tadi disebutke kakak tadi harus kito etong galo dulu eh baru apo baru pacak tau kan PPh 21 nyo sekian misalno.”*

Secara keseluruhan, ketiga narasumber menunjukkan bahwa belum dilakukannya perhitungan pajak penghasilan pasal 21 akan berdampak dikenakannya sanksi perpajakan yaitu denda keterlambatan pelaporan sebesar Rp100.000. Mereka sepakat bahwa perhitungan pajak penghasilan pasal 21 akan sangat membantu untuk menentukan besaran pajak penghasilan pasal 21 yang akan dipotong dan dibayarkan. Dengan demikian, ada kebutuhan mendesak untuk menghitung pajak penghasilan pasal 21 dalam pemenuhan kewajiban perpajakan perusahaan yang belum terpenuhi.

**TABEL ANALISIS KODING MANUAL DENGAN TEMATIK ANALISIS
TEMA PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK**

TEMA BESAR	KATA KUNCI	KATEGORISASI	HASIL
Penghasilan Tidak Kena Pajak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perhitungan penghasilan tidak kena pajak belum dilakukan. 2. Tidak memahami peraturan perpajakan mengenai tata cara perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan pasal 21. 3. Dampak apabila belum melakukan perhitungan adalah akan dikenakan sanksi perpajakan. 4. Perhitungan penghasilan tidak kena pajak sangat penting diperhitungkan. 5. Setuju untuk memperhitungkan penghasilan tidak kena pajak berdasarkan undang-undang dan peraturan pajak yang berlaku. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perhitungan penghasilan tidak kena pajak belum dilakukan. 2. Perhitungan penghasilan tidak kena pajak sangat penting diperhitungkan. 3. Setuju untuk memperhitungkan penghasilan tidak kena pajak berdasarkan undang-undang dan peraturan pajak yang berlaku. 	Dibutuhkannya penerapan perhitungan PPh Pasal 21 sebelum dan sesudah PP 58/PMK 168 Tahun 2023.

INTERPRETASI HASIL WAWANCARA

Berdasarkan hasil wawancara, perhitungan penghasilan tidak kena pajak di CV Muda Ria saat ini belum dilakukan. Narasumber pertama menyatakan, *"dak tau jugo ibu PTKP tu apo dio itu."* Narasumber kedua menambahkan, *"tau kalu PTKP bapak ki, tapi disini belom tau PTKP nyo ki. kagek aku pintakke be maseng-maseng status karyawannyo, agek aku ngomong samo bu Wirda."* Narasumber ketiga juga mengatakan, *"aku ni tau dikit si kak, ... tapi ni di perusahaan ini belom kak."* Ketiga narasumber mengungkapkan bahwa belum dilakukannya perhitungan ini memiliki dampak yaitu akan dikenakan sanksi perpajakan. Narasumber pertama mengatakan *"ado, kemaren dapet kabar dari Arifin katonyo kito keno dendo pajak pasal 21 ni Rp100.000 sejak tahun 2020."* Narasumber kedua menegaskan, *"belom men dendo ni dendo nyo, tapi dak tau ngapo kemaren tu dapet surat tagihan pajak Rp100.000 per taon 2020 gara-gara"*

kito dak ngitung jadinya dak lapor pasal 21 tu.” Narasumber ketiga menambahkan, *“ado kak, kemaren tu aku ni disoro ke BNI samo pak Arifin, untuk nyetorke apo yo, iyo duit ke pajak dendo nyo tu Rp100.000 kalo dak salah yo tentang pajak inila kak Rp100.000 kemaren tu.”*

Ketiga narasumber sepakat bahwa perhitungan penghasilan tidak kena pajak sangat penting diperhitungkan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan perusahaan. Narasumber pertama menjelaskan, *“penting nian ini, soalnya kami dak tau cakmano ngitung itu, jadi dak tegawe bingung jugo ibu ni sebab perusahaan kemaren keno dendo.”* Narasumber kedua mendukung, *“penteng ki, sejar jugo dendonyo kalu kito dak ngitung samo dak lapor pasal 21.”* Narasumber ketiga juga setuju, *“penting nian kak, ini kan kewajiban perusahaan amen uji kito tu, lah ado pulo undang-undangnya, kalu dak dilakuke yo itula tadi resiko kagek kedepannya nak cakmano lagi cak ituna.”* Semua narasumber sangat merespon positif untuk memperhitungkan penghasilan tidak kena pajak berdasarkan undang-undang dan peraturan pajak yang berlaku. Narasumber pertama setuju dengan pernyataan, *“ibuk setuju ki, supaya orosan pajak CV ini cepet selesai jugo kan. Harapannya proses itungan kamu bener kan.”* Narasumber kedua juga berkomentar, *“aku setuju bae ki, berarti kito ni harus ngitung yang awal tadi dari gaji pokok segalo macem itu.”* Narasumber ketiga menyimpulkan, *“yo setuju lah kak, jadi yang tadi disebutke kakak tadi harus kito etong galo dulu eh baru apo baru pacak tau kan PPh 21 nyo sekian misalnya.”*

Secara keseluruhan, ketiga narasumber menunjukkan bahwa belum dilakukannya perhitungan pajak penghasilan pasal 21 akan berdampak dikenakannya sanksi perpajakan yaitu denda keterlambatan pelaporan sebesar Rp100.000. Mereka sepakat bahwa perhitungan pajak penghasilan pasal 21 akan sangat membantu untuk menentukan besaran pajak penghasilan pasal 21 yang akan dipotong dan dibayarkan. Dengan demikian, ada kebutuhan mendesak untuk menghitung pajak penghasilan pasal 21 dalam pemenuhan kewajiban perpajakan perusahaan yang belum terpenuhi.

**TABEL ANALISIS KODING MANUAL DENGAN TEMATIK ANALISIS
TEMA PENGHASILAN KENA PAJAK**

TEMA BESAR	KATA KUNCI	KATEGORISASI	HASIL
Penghasilan Kena Pajak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perhitungan penghasilan kena pajak belum dilakukan. 2. Tidak memahami peraturan perpajakan mengenai tata cara perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan pasal 21. 3. Dampak apabila belum melakukan perhitungan adalah akan dikenakan sanksi perpajakan. 4. Perhitungan penghasilan kena pajak sangat penting diperhitungkan. 5. Setuju untuk memperhitungkan penghasilan kena pajak berdasarkan undang-undang dan peraturan pajak yang berlaku. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perhitungan penghasilan kena pajak belum dilakukan. 2. Perhitungan penghasilan kena pajak sangat penting diperhitungkan. 3. Setuju untuk memperhitungkan penghasilan kena pajak berdasarkan undang-undang dan peraturan pajak yang berlaku. 	Dibutuhkannya penerapan perhitungan PPh Pasal 21 sebelum dan sesudah PP 58/PMK 168 Tahun 2023.

INTERPRETASI HASIL WAWANCARA

Berdasarkan hasil wawancara, perhitungan penghasilan kena pajak di CV Muda Ria saat ini belum dilakukan. Narasumber pertama menyatakan, *"noh apolagi itu, belom belom tau nian."* Narasumber kedua menambahkan, *"belom jugo PKP ki."* Narasumber ketiga juga mengatakan, *"hm penghasilan kena pajak tu belom dietong kak."* Ketiga narasumber mengungkapkan bahwa belum dilakukannya perhitungan ini memiliki dampak yaitu akan dikenakan sanksi perpajakan. Narasumber pertama mengatakan *"ado, kemaren dapet kabar dari Arifin katonyo kito keno dendo pajak pasal 21 ni Rp100.000 sejak tahun 2020."* Narasumber kedua menegaskan, *"belom men dendo ni dendo nyo, tapi dak tau ngapo kemaren tu dapet surat tagihan pajak Rp100.000 per taon 2020 gara-gara kito dak ngitung jadinya dak lapor pasal 21 tu."* Narasumber ketiga menambahkan, *"ado kak, kemaren tu aku ni disoro ke BNI samo pak Arifin, untuk*

nyetorke apo yo, iyo duit ke pajak dendo nyo tu Rp100.000 kalo dak salah yo tentang pajak inila kak Rp100.000 kemaren tu.”

Ketiga narasumber sepakat bahwa perhitungan penghasilan kena pajak sangat penting diperhitungkan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan perusahaan. Narasumber pertama menjelaskan, *“penting nian ini, soalnya kami dak tau cakmano ngitung itu, jadi dak tegawe bingung jugo ibu ni sebab perusahaan kemaren keno dendo.”* Narasumber kedua mendukung, *“penteng ki, sejar jugo dendonyo kalu kito dak ngitung samo dak lapor pasal 21.”* Narasumber ketiga juga setuju, *“penting nian kak, ini kan kewajiban perusahaan amen uji kito tu, lah ado pulo undang-undangnyo, kalu dak dilakuke yo itula tadi resiko kagek kedepannyo nak cakmano lagi cak ituna.”* Semua narasumber sangat merespon positif untuk memperhitungkan penghasilan kena pajak berdasarkan undang-undang dan peraturan pajak yang berlaku. Narasumber pertama setuju dengan pernyataan, *“ibuk setuju ki, supaya orosan pajak CV ini cepet selesai jugo kan. Harapannyo proses itungan kamu bener kan.”* Narasumber kedua juga berkomentar, *“aku setuju bae ki, berarti kito ni harus ngitung yang awal tadi dari gaji pokok segalo macem itu.”* Narasumber ketiga menyimpulkan, *“yo setuju lah kak, jadi yang tadi disebotke kakak tadi harus kito etong galo dulu eh baru apo baru pacak tau kan PPh 21 nyo sekian misalnyo.”*

Secara keseluruhan, ketiga narasumber menunjukkan bahwa belum dilakukannya perhitungan pajak penghasilan pasal 21 akan berdampak dikenakannya sanksi perpajakan yaitu denda keterlambatan pelaporan sebesar Rp100.000. Mereka sepakat bahwa perhitungan pajak penghasilan pasal 21 akan sangat membantu untuk menentukan besaran pajak penghasilan pasal 21 yang akan dipotong dan dibayarkan. Dengan demikian, ada kebutuhan mendesak untuk menghitung pajak penghasilan pasal 21 dalam pemenuhan kewajiban perpajakan perusahaan yang belum terpenuhi.

**TABEL ANALISIS KODING MANUAL DENGAN TEMATIK ANALISIS
TEMA TARIF PAJAK PENGHASILAN PASAL 21**

TEMA BESAR	KATA KUNCI	KATEGORISASI	HASIL
Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perhitungan tarif pajak penghasilan pasal 21 belum dilakukan. 2. Tidak memahami peraturan perpajakan mengenai tata cara perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan pasal 21. 3. Dampak apabila belum melakukan perhitungan adalah akan dikenakan sanksi perpajakan. 4. Perhitungan tarif pajak penghasilan pasal 21 sangat penting diperhitungkan. 5. Setuju untuk memperhitungkan tarif pajak penghasilan pasal 21 berdasarkan undang-undang dan peraturan pajak yang berlaku. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perhitungan tarif pajak penghasilan pasal 21 belum dilakukan. 2. Perhitungan tarif pajak penghasilan pasal 21 sangat penting diperhitungkan. 3. Setuju untuk memperhitungkan tarif pajak penghasilan pasal 21 berdasarkan undang-undang dan peraturan pajak yang berlaku. 	Dibutuhkannya penerapan perhitungan PPh Pasal 21 sebelum dan sesudah PP 58/PMK 168 Tahun 2023.

INTERPRETASI HASIL WAWANCARA

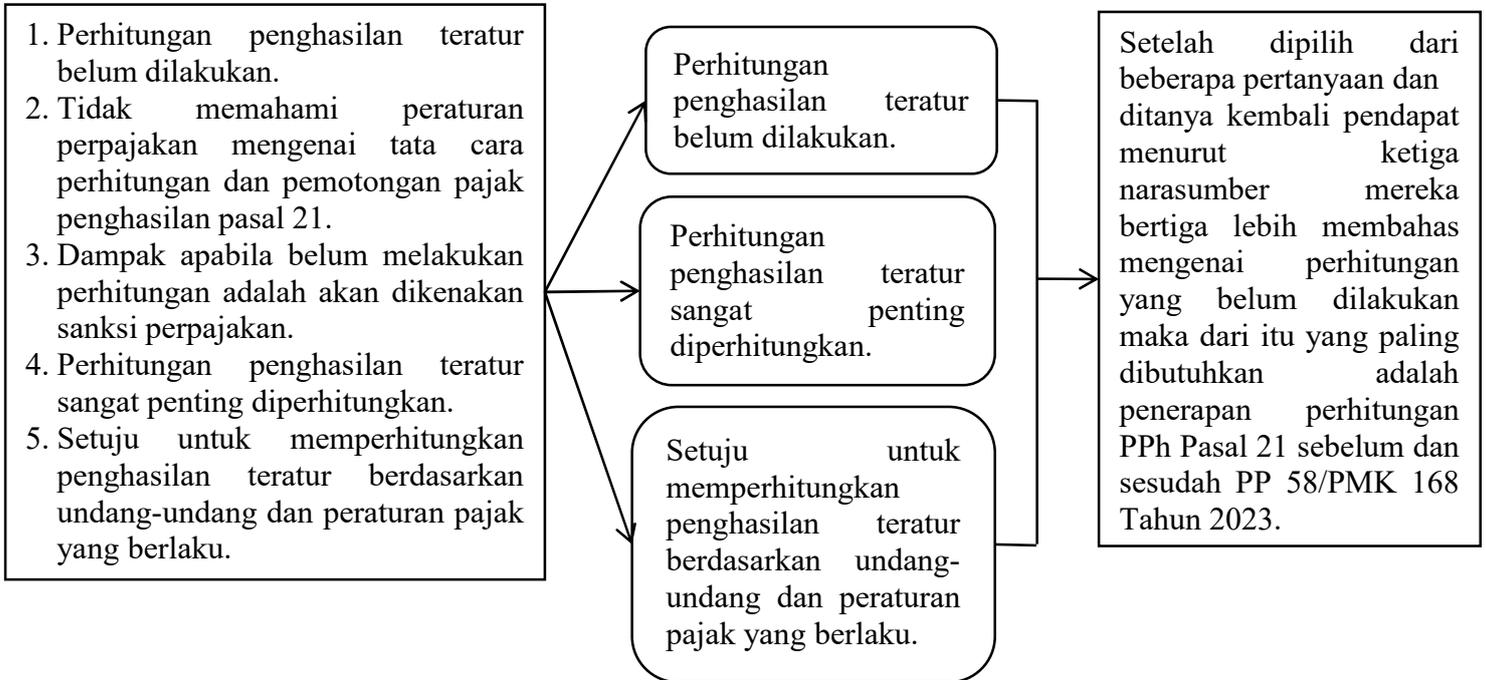
Berdasarkan hasil wawancara, perhitungan tarif pajak penghasilan pasal 21 di CV Muda Ria saat ini belum dilakukan. Narasumber pertama menyatakan, *"iyodak tau jugo, nah banyak nian dak tau nyo nih."* Narasumber kedua menambahkan, *"belum ki, kalu dak salah yang progresif itu eh sam, yang naek teros itu na pokoknyo tarifnyo tu mencak cak pajak mobil tu na progresif."* Narasumber ketiga juga mengatakan, *"iyo dak tau jugo dan jugo kami belom ngetong tarifnyo."* Ketiga narasumber mengungkapkan bahwa belum dilakukannya perhitungan ini memiliki dampak yaitu akan dikenakan sanksi perpajakan. Narasumber pertama mengatakan *"ado, kemaren dapet kabar dari Arifin katonyo kito keno dendo pajak pasal 21 ni Rp100.000 sejak tahun 2020."* Narasumber kedua menegaskan, *"belum men dendo ni dendo nyo, tapi dak tau ngapo kemaren tu dapet surat tagihan pajak Rp100.000 per taon 2020 gara-gara"*

kito dak ngitung jadinya dak lapor pasal 21 tu.” Narasumber ketiga menambahkan, “ado kak, kemaren tu aku ni disoro ke BNI samo pak Arifin, untuk nyetorke apo yo, iyo duit ke pajak dendo nyo tu Rp100.000 kalo dak salah yo tentang pajak inila kak Rp100.000 kemaren tu.”

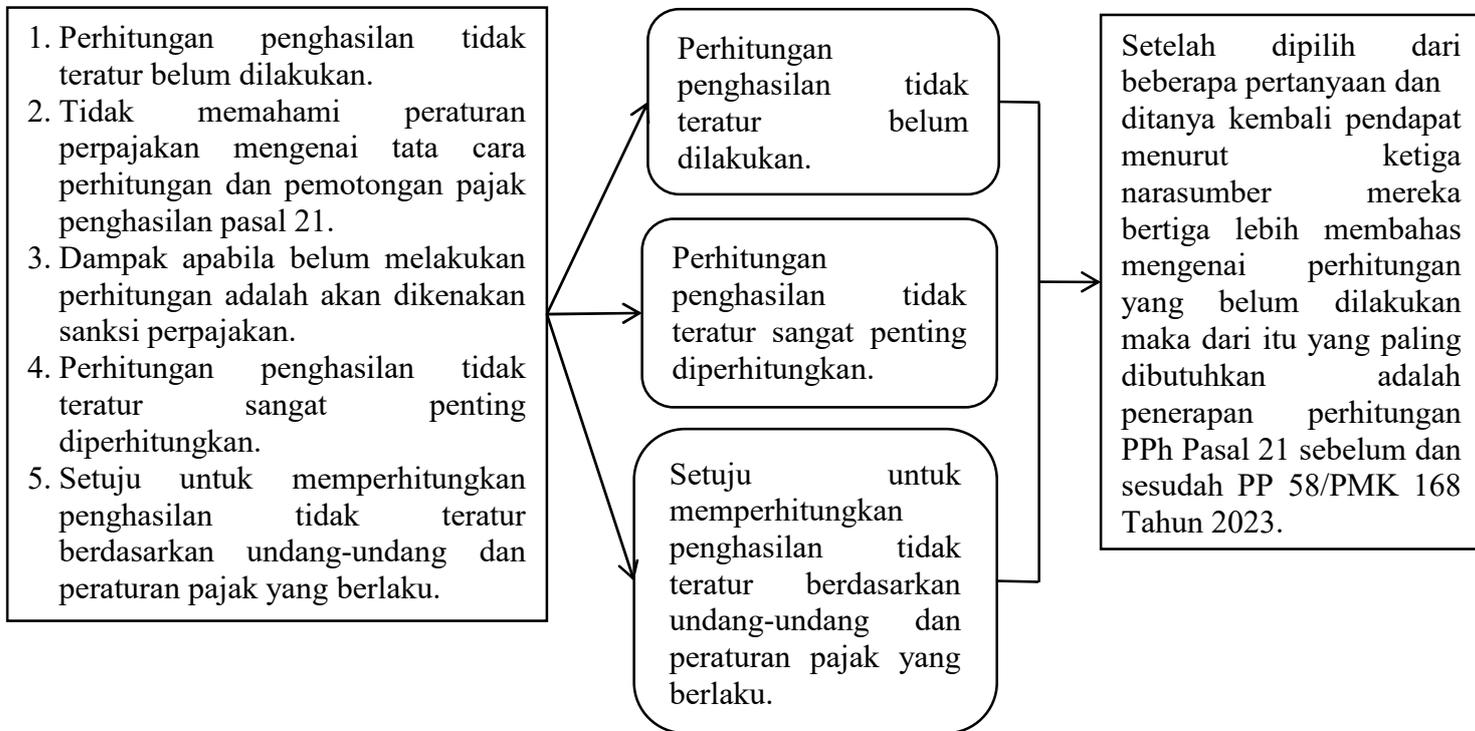
Ketiga narasumber sepakat bahwa perhitungan tarif pajak penghasilan pasal 21 sangat penting diperhitungkan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan perusahaan. Narasumber pertama menjelaskan, *“penting nian ini, soalnya kami dak tau cakmano ngitung itu, jadi dak tegawe bingung jugo ibu ni sebab perusahaan kemaren keno dendo.”* Narasumber kedua mendukung, *“penteng ki, sejar jugo dendonyo kalu kito dak ngitung samo dak lapor pasal 21.”* Narasumber ketiga juga setuju, *“penting nian kak, ini kan kewajiban perusahaan amen uji kito tu, lah ado pulo undang-undangnyo, kalu dak dilakuke yo itula tadi resiko kagek kedepannyo nak cakmano lagi cak ituna.”* Semua narasumber sangat merespon positif untuk memperhitungkan tarif pajak penghasilan pasal 21 berdasarkan undang-undang dan peraturan pajak yang berlaku. Narasumber pertama setuju dengan pernyataan, *“ibuk setuju ki, supaya orosan pajak CV ini cepet selesai jugo kan. Harapannyo proses itungan kamu bener kan.”* Narasumber kedua juga berkomentar, *“aku setuju bae ki, berarti kito ni harus ngitung yang awal tadi dari gaji pokok segalo macem itu.”* Narasumber ketiga menyimpulkan, *“yo setuju lah kak, jadi yang tadi disebutke kakak tadi harus kito etong galo dulu eh baru apo baru pacak tau kan PPh 21 nyo sekian misalnya.”*

Secara keseluruhan, ketiga narasumber menunjukkan bahwa belum dilakukannya perhitungan pajak penghasilan pasal 21 akan berdampak dikenakannya sanksi perpajakan yaitu denda keterlambatan pelaporan sebesar Rp100.000. Mereka sepakat bahwa perhitungan pajak penghasilan pasal 21 akan sangat membantu untuk menentukan besaran pajak penghasilan pasal 21 yang akan dipotong dan dibayarkan. Dengan demikian, ada kebutuhan mendesak untuk menghitung pajak penghasilan pasal 21 dalam pemenuhan kewajiban perpajakan perusahaan yang belum terpenuhi.

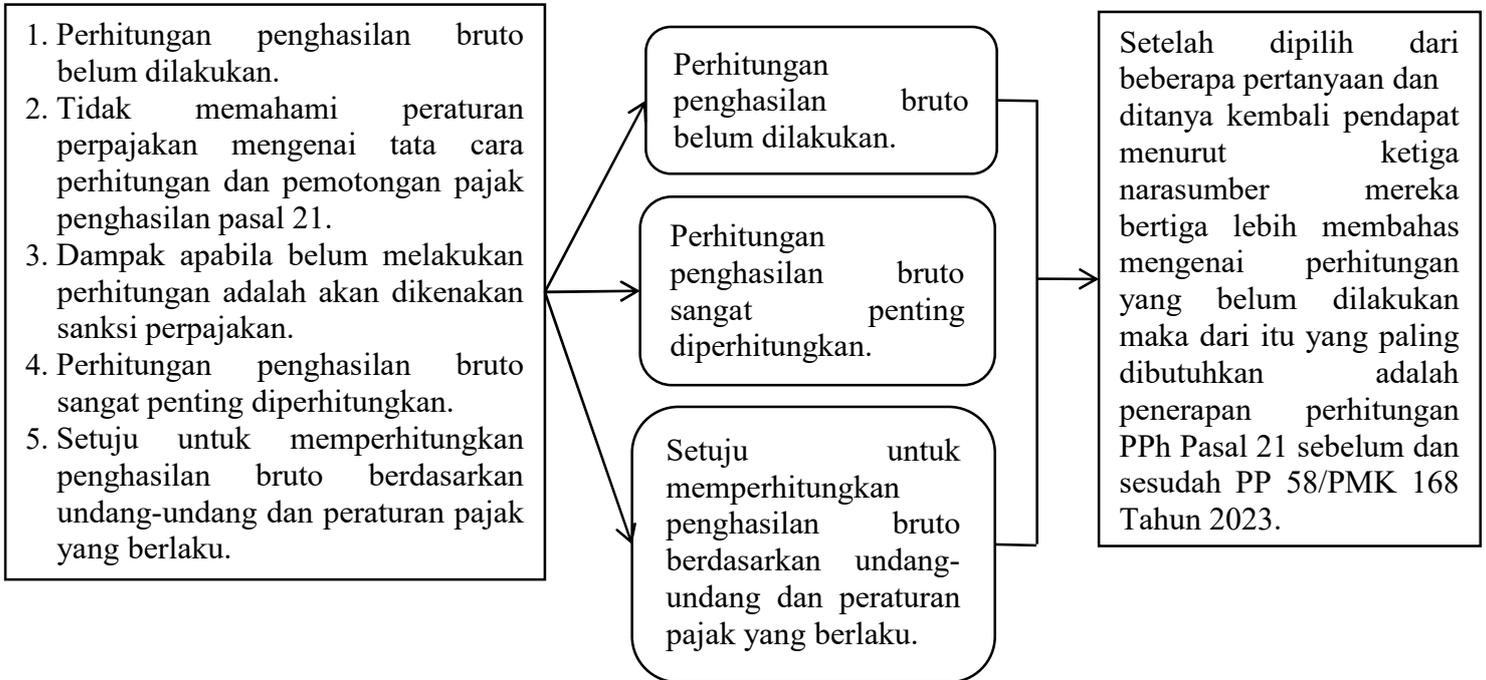
TEMA PENGHASILAN TERATUR



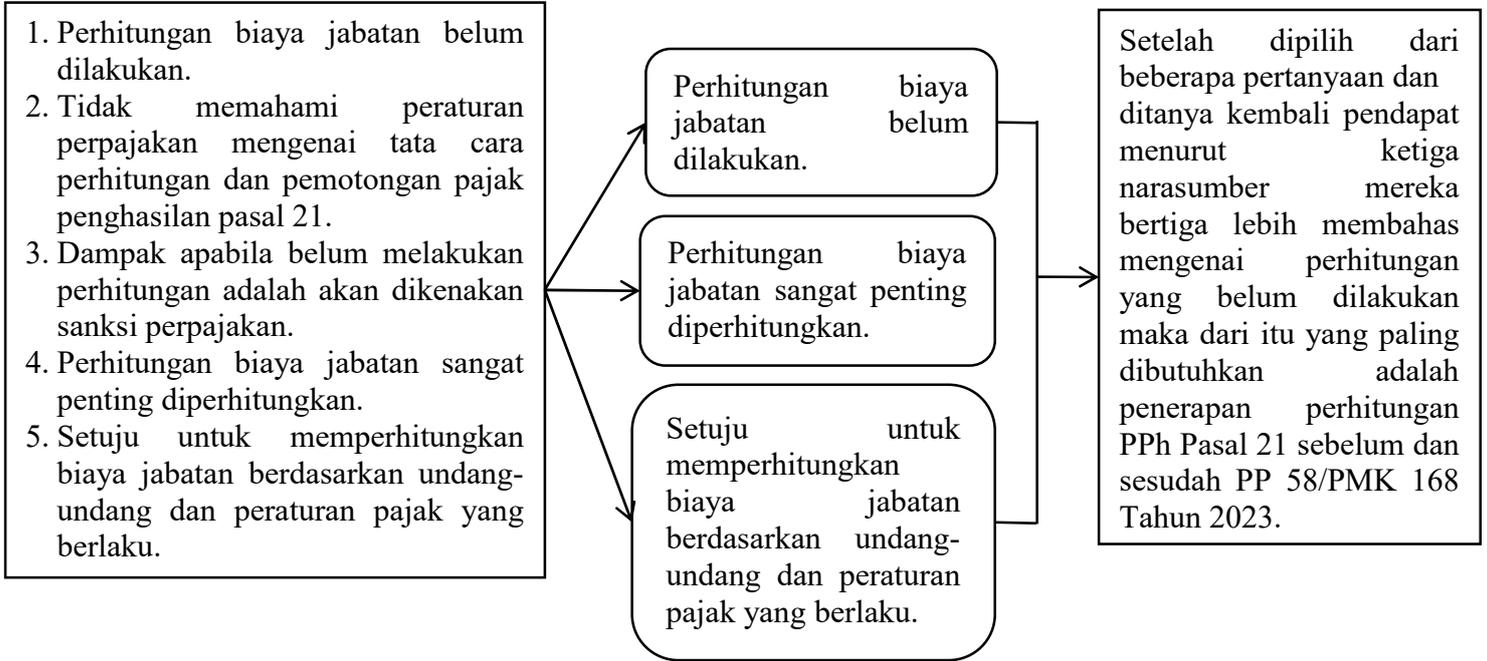
TEMA PENGHASILAN TIDAK TERATUR



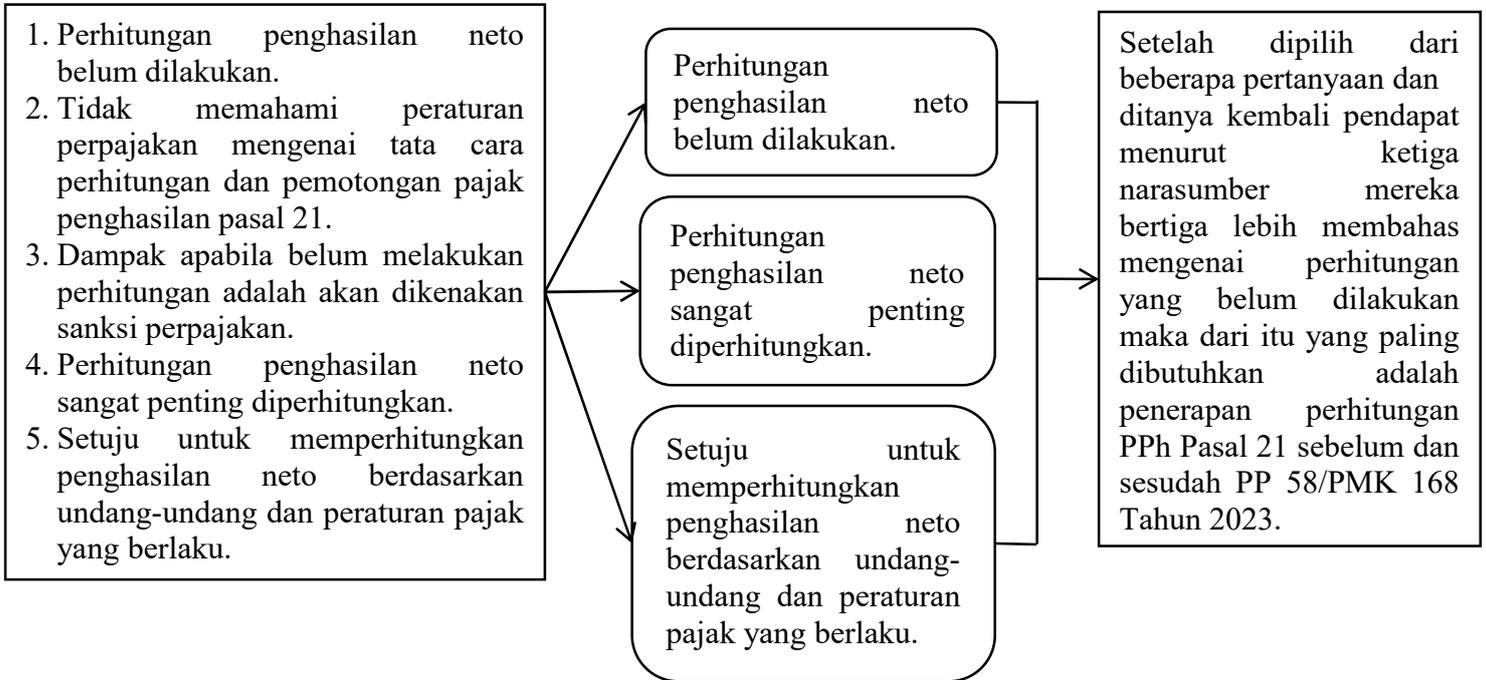
TEMA PENGHASILAN BRUTO



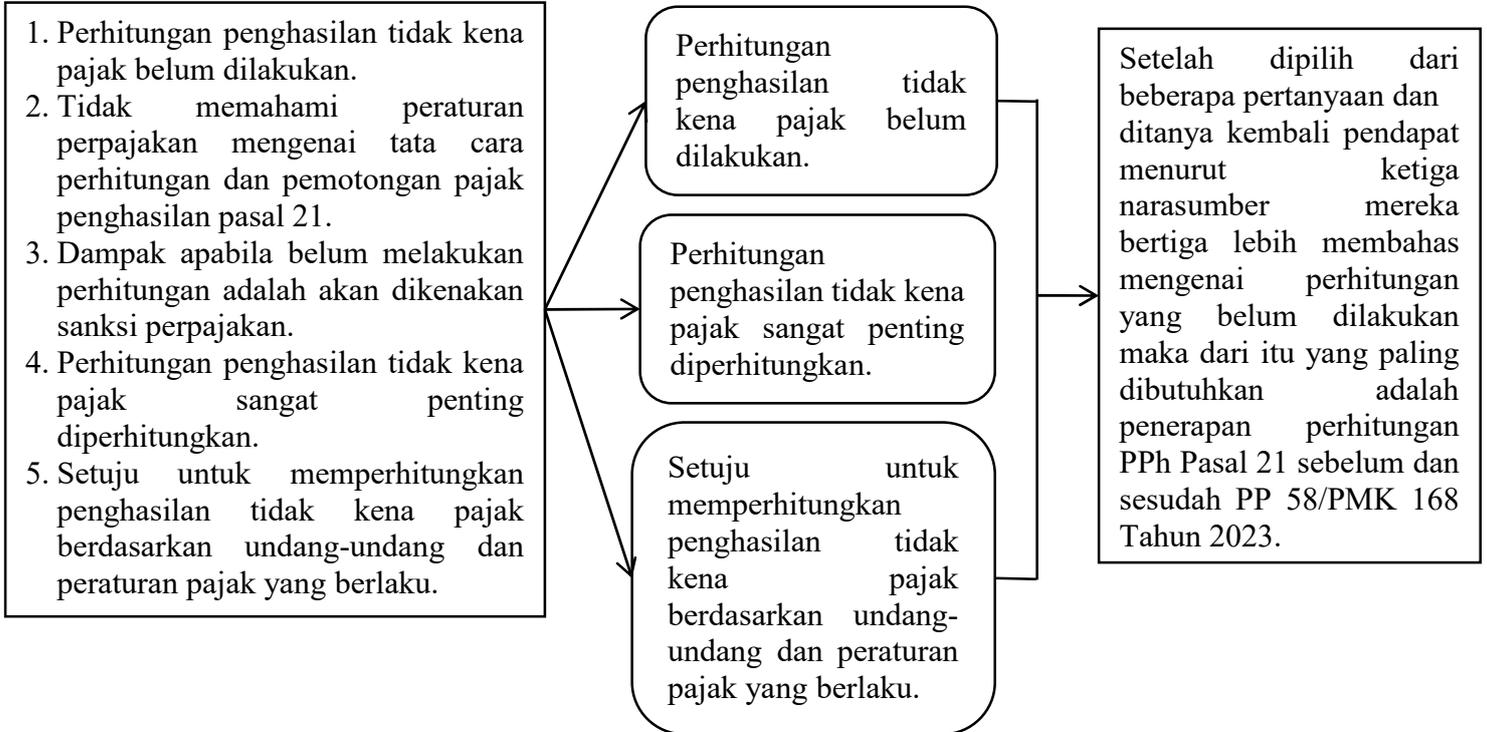
TEMA BIAYA JABATAN



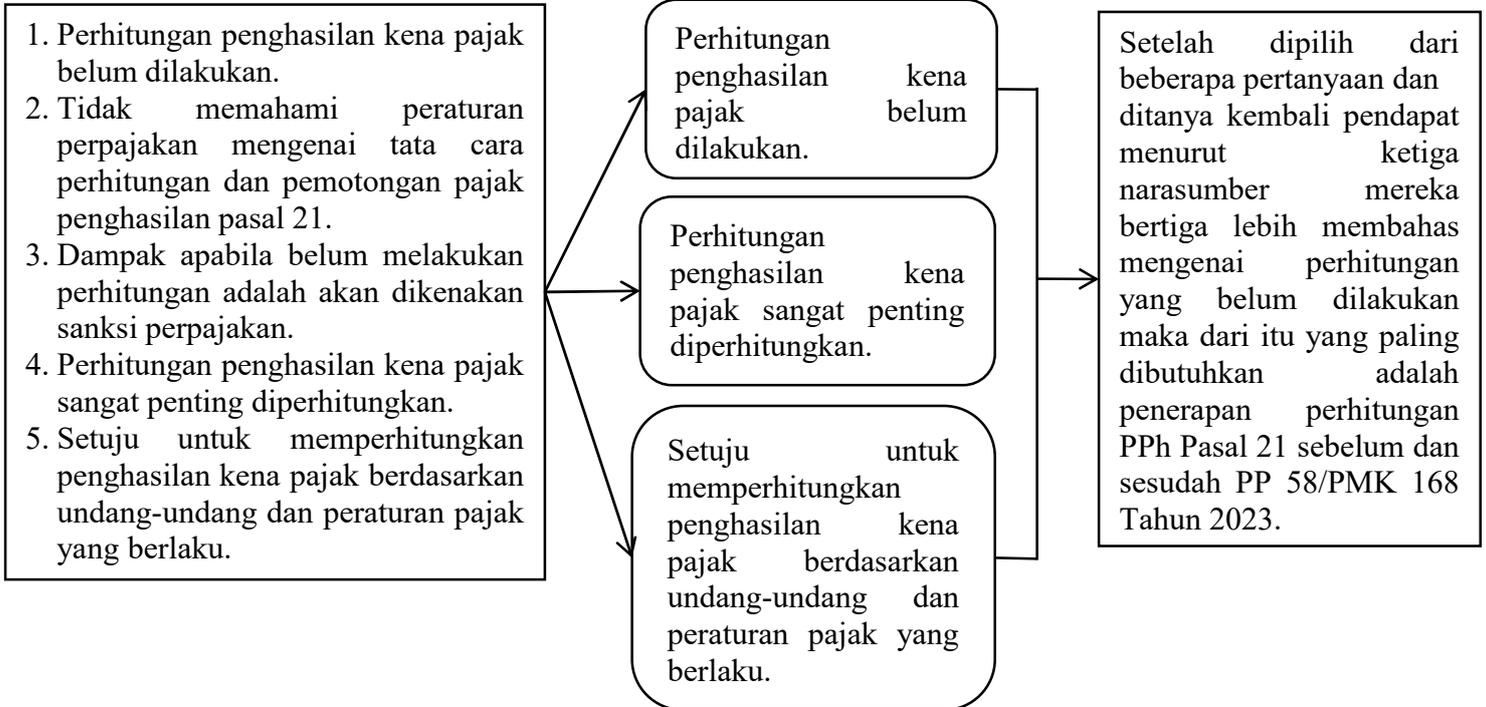
TEMA PENGHASILAN NETO



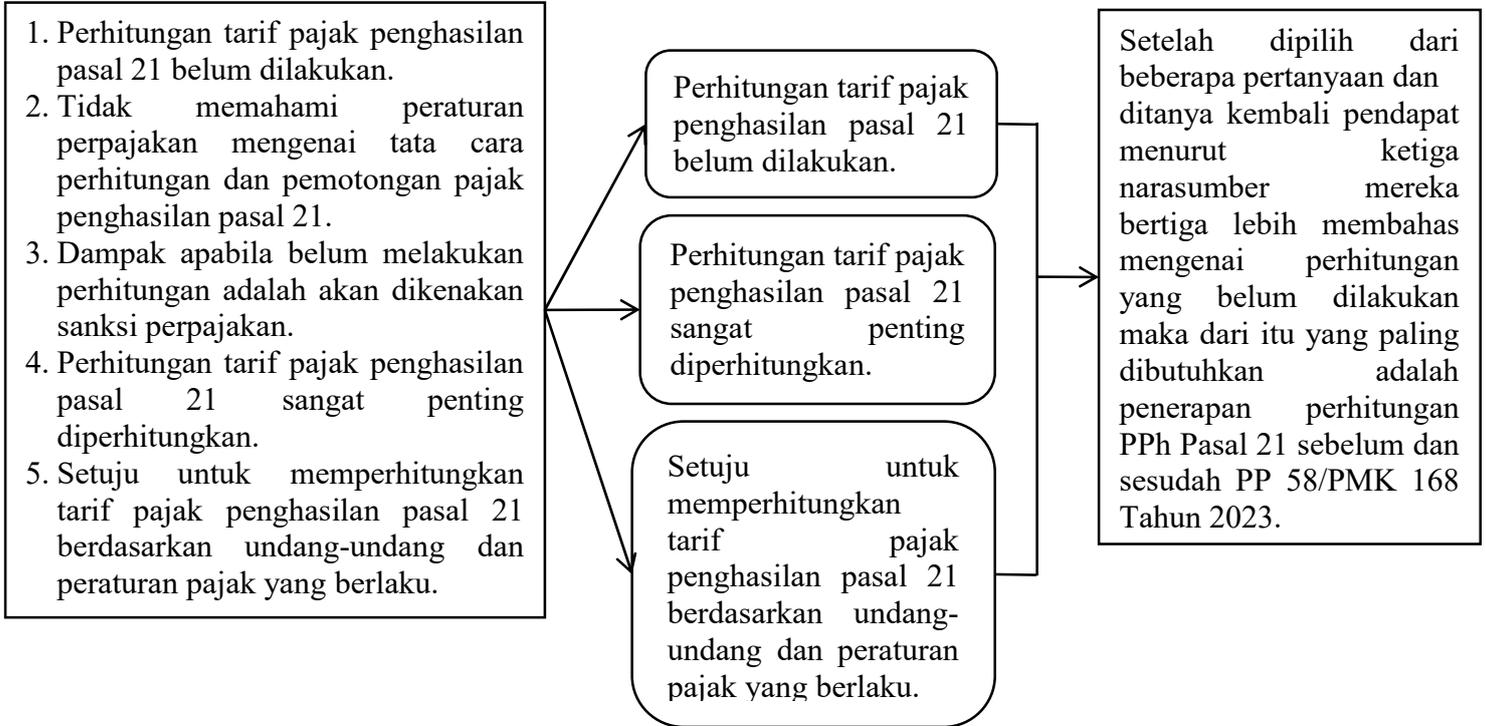
TEMA PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK



TEMA PENGHASILAN KENA PAJAK



TEMA TARIF PAJAK PENGHASILAN PASAL 21



Berdasarkan analisis tematik terkait wawancara dari narasumber yang telah dilakukan penulis kepada CV Muda Ria di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa CV Muda Ria belum melakukan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 terhadap karyawannya sehingga kewajiban pemotongan pajak penghasilan pasal 21 pada CV Muda Ria belum dilaksanakan. Jika CV Muda Ria tidak memotong pajak penghasilan pasal 21, maka akan dikenakan sanksi perpajakan seperti pokok, bunga, denda dan kenaikan pajak selama 5 tahun ke belakang sehubungan dengan konsep daluwarsa dalam perpajakan. CV Muda Ria dalam melakukan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 harus melakukan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 terlebih dahulu seperti perhitungan penghasilan teratur, penghasilan tidak teratur, penghasilan bruto, biaya jabatan, penghasilan neto, penghasilan tidak kena pajak, penghasilan kena pajak, dan tarif pajak penghasilan pasal 21 berdasarkan Undang-Undang dan Ketentuan Pajak yang berlaku di tahun pajak yang bersangkutan. Sehingga penulis menyarankan CV Muda Ria untuk menerapkan perhitungan PPh Pasal 21 sebelum dan sesudah PP 58/PMK 168 Tahun 2023.

MDR

CV MUDA RIA

Dusun I Desa Simpang Nibung Rawas Sungai Jauh Rawas Ulu -
Kabupaten Musi Rawas Utara
Telp. 081215409074 Email : arifingraha@gmail.com

DAFTAR KARYAWAN TETAP

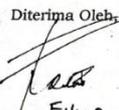
NO	NAMA	STATUS	KTP	JABATAN	ALAMAT	NO. HP
1	Fikao	TK/0	1605051812970001	Admin	Dsn, RW.2, Sungai Jauh, Kec. Rawas Ulu, Kab. Musi Rawas Utara, Sumatera Selatan 31656	089693236691
2	Pendi	K/2	1605050908900001	Satpam	Jl. Masjid Taqwa, Sungai Jauh, Kec. Rawas Ulu, Kab. Musi Rawas Utara, Sumatera Selatan 31656	082282222395
3	Marwan	K/1	1605051405890001	Sopir OP	Jl. Sarolangun - Lubuk Linggau, Dusun 03, Sungai Jauh, Kec. Rawas Ulu, Kab. Musi Rawas Utara, Sumatera Selatan 31656	081231261611
4	Amin	K/1	1503031209820001	Sopir OP	Jl. Poros Desa - Lubuk Linggau, Dusun 03, Sungai Jauh, Kec. Rawas Ulu, Kab. Musi Rawas Utara, Sumatera Selatan 31656	081542593251
5	Alex	K/1	1508123081910001	Sopir OP	Desa Sungai Jauh, Kec. Rawas Ulu, Kab. Musi Rawas Utara, Sumatera Selatan 31656	081311637628
6	Muchtar	K/1	1508123112880001	Sopir OP	Jl. Masjid Taqwa, Sungai Jauh, Kec. Rawas Ulu, Kab. Musi Rawas Utara, Sumatera Selatan 31656	081354836199
7	Fahmi	K/1	1605050408840001	Sopir OP	Lrg Sepakat, Sungai Jauh, Kec. Rawas Ulu, Kab. Musi Rawas Utara, Sumatera Selatan 31656	089574816491
8	Febri	K/2	1605051203900001	Sopir OP	Jl. Sarolangun - Lubuk Linggau, Simpang Nibung, Kec. Singkut, Kabupaten Sarolangun, Jambi 31656	088210062991
9	Putra	K/1	1508121109890001	Sopir OP	Perdamaian, Kec. Singkut, Kabupaten Sarolangun, Jambi 37482	089646459967
10	Abas	K/1	1503032490910001	Sopir OP	Muara Rupit, Kec. Rupit, Kab. Musi Rawas Utara, Sumatera Selatan 31654	085255535393
11	Hasan	K/0	1503031911860001	Sopir OP	Jalan Veteran Rt 04 Rw 01.Kel.muara Rupit Kec.rupit Kab, Muara Rupit, Kec. Rupit, Kab. Musi Rawas Utara, Sumatera Selatan 31654	085270700075
12	Megis	K/1	1508121409820001	Sopir OP	Jl. Sarolangun - Lubuk Linggau, Dusun 03, Sungai Jauh, Kec. Rawas Ulu, Kab. Musi Rawas Utara, Sumatera Selatan 31656	081380593341
13	A. Rusdi	K/1	1673021607920001	Sopir OP	Jl. Lama Besar Desa Kel. Muara Kec. Rupit Kab. Muratara, Lawang Agung, Kec. Rupit, Kab. Musi Rawas Utara, Sumatera Selatan 31654	081371951999
14	Ali	K/1	1605051804950001	Sopir OP	Dusun Sungai Jemih, Kec. Rupit, Kab. Musi Rawas Utara, Sumatera Selatan 31654	089566460017



CV. MUDA RIAJL LINTAS SUMATERA SIMPANG NIBUNG
RAWAS, KEC RAWAS ULU KAB. MURATARA**SLIP GAJI****MDR**Nama : FIKAO
Jabatan : ADMIN

NO.	KETERANGAN	JUMLAH
RINCIAN GAJI		
1	Gaji Pokok	2.500.000
2	Tunjangan Uang Makan dan Transportasi	1.000.000
3	THR	
Total		3.500.000

Diterima Oleh,


Fikao
Karyawan

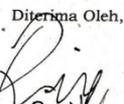
Musi Rawas Utara, 01 APRIL 2023

Diserahkan Oleh,


Direktur**CV. MUDA RIA**JL LINTAS SUMATERA SIMPANG NIBUNG
RAWAS, KEC RAWAS ULU KAB. MURATARA**SLIP GAJI****MDR**Nama : PENDI
Jabatan : SATPAM

NO.	KETERANGAN	JUMLAH
RINCIAN GAJI		
1	Gaji Pokok	3.000.000
2	Tunjangan Uang Makan dan Transportasi	1.000.000
3	THR	
Total		4.000.000

Diterima Oleh,


PENDI
Karyawan

Musi Rawas Utara, 01 APRIL 2023

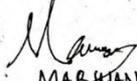
Diserahkan Oleh,


Direktur

CV. MUDA RIAJL LINTAS SUMATERA SIMPANG NIBUNG
RAWAS, KEC RAWAS ULU KAB. MURATARA**SLIP GAJI****MDR**Nama : MARWAN
Jabatan : SOPIR

NO.	KETERANGAN	JUMLAH
RINCIAN GAJI		
1	Gaji Pokok	3.600.000
2	Tunjangan Uang Makan dan Transportasi	1.400.000
3	THR	1.000.000
Total		6.000.000

Diterima Oleh,


MARWAN
Karyawan

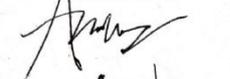
Musi Rawas Utara, 01 APRIL 2023

Diserahkan Oleh,


WINDA
Direktur**CV. MUDA RIA**JL LINTAS SUMATERA SIMPANG NIBUNG
RAWAS, KEC RAWAS ULU KAB. MURATARA**SLIP GAJI****MDR**Nama : AMIN
Jabatan : SOPIR

NO.	KETERANGAN	JUMLAH
RINCIAN GAJI		
1	Gaji Pokok	3.600.000,-
2	Tunjangan Uang Makan dan Transportasi	1.400.000,-
3	THR	1.000.000,-
Total		6.000.000,-

Diterima Oleh,


AMIN
Karyawan

Musi Rawas Utara, 01 APRIL 2023

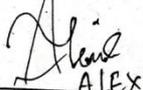
Diserahkan Oleh,


WINDA
Direktur

CV. MUDA RIAJL LINTAS SUMATERA SIMPANG NIBUNG
RAWAS, KEC RAWAS ULU KAB. MURATARA**SLIP GAJI****MDR**Nama : ALEX
Jabatan : SOPIR

NO.	KETERANGAN	JUMLAH
RINCIAN GAJI		
1	Gaji Pokok	3.600.000
2	Tunjangan Uang Makan dan Transportasi	1.400.000
3	THR	1.000.000
Total		6.000.000

Diterima Oleh,


ALEX
Karyawan

Musi Rawas Utara, 01 April 2023

Diserahkan Oleh,


MDR
Direktur**CV. MUDA RIA**JL LINTAS SUMATERA SIMPANG NIBUNG
RAWAS, KEC RAWAS ULU KAB. MURATARA**SLIP GAJI****MDR**Nama : MUCHTAR
Jabatan : SOPIR

NO.	KETERANGAN	JUMLAH
RINCIAN GAJI		
1	Gaji Pokok	3.600.000
2	Tunjangan Uang Makan dan Transportasi	1.400.000
3	THR	1.000.000
Total		6.000.000

Diterima Oleh,


MUCHTAR
Karyawan

Musi Rawas Utara, 01 April 2023

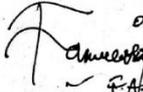
Diserahkan Oleh,


MDR
Direktur

CV. MUDA RIAJL LINTAS SUMATERA SIMPANG NIBUNG
RAWAS, KEC RAWAS ULU KAB. MURATARA**SLIP GAJI****MDR**Nama : FAHMI
Jabatan : SOPIR

NO.	KETERANGAN	JUMLAH
RINCIAN GAJI		
1	Gaji Pokok	3.500.000
2	Tunjangan Uang Makan dan Transportasi	1.400.000
3	THR	1.000.000
Total		5.900.000

Diterima Oleh,


FAHMI
Karyawan

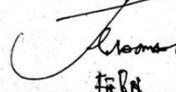
Musi Rawas Utara, 01 April 2023

Diserahkan Oleh,


WINDA
Direktur**CV. MUDA RIA**JL LINTAS SUMATERA SIMPANG NIBUNG
RAWAS, KEC RAWAS ULU KAB. MURATARA**SLIP GAJI****MDR**Nama : FEBRI
Jabatan : SOPIR

NO.	KETERANGAN	JUMLAH
RINCIAN GAJI		
1	Gaji Pokok	3.500.000,-
2	Tunjangan Uang Makan dan Transportasi	1.400.000,-
3	THR	1.000.000,-
Total		5.900.000,-

Diterima Oleh,


FEBRI
Karyawan

Musi Rawas Utara, 01 April 2023

Diserahkan Oleh,


WINDA
Direktur

CV. MUDA RIA

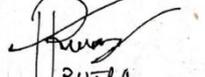
JL LINTAS SUMATERA SIMPANG NIBUNG
 RAWAS, KEC RAWAS ULU KAB. MURATARA

SLIP GAJI**MDR**

Nama : PUTRA
 Jabatan : SOPIR

NO.	KETERANGAN	JUMLAH
RINCIAN GAJI		
1	Gaji Pokok	3.200.000,-
2	Tunjangan Uang Makan dan Transportasi	1.400.000,-
3	THR	1.000.000,-
Total		5.600.000,-

Diterima Oleh,


 PUTRA
 Karyawan

Musi Rawas Utara, 01 April 2023

Diserahkan Oleh,


 WILSON
 Direktur

CV. MUDA RIA

JL LINTAS SUMATERA SIMPANG NIBUNG
 RAWAS, KEC RAWAS ULU KAB. MURATARA

SLIP GAJI**MDR**

Nama : ABAS
 Jabatan : SOPIR

NO.	KETERANGAN	JUMLAH
RINCIAN GAJI		
1	Gaji Pokok	3.200.000,-
2	Tunjangan Uang Makan dan Transportasi	1.400.000,-
3	THR	1.000.000,-
Total		5.600.000,-

Diterima Oleh,


 ABAS
 Karyawan

Musi Rawas Utara, 01 April 2023

Diserahkan Oleh,


 WILSON
 Direktur

CV. MUDA RIAJL LINTAS SUMATERA SIMPANG NIBUNG
RAWAS, KEC RAWAS ULU KAB. MURATARA**SLIP GAJI****MDR**Nama : HASAN
Jabatan : SOPIR

NO.	KETERANGAN	JUMLAH
RINCIAN GAJI		
1	Gaji Pokok	3.000.000,-
2	Tunjangan Uang Makan dan Transportasi	1.400.000,-
3	THR	1.000.000,-
	Total	5.400.000,-

Diterima Oleh,

HASAN
HASAN
Karyawan

Musi Rawas Utara, 01 APRIL 2023

Diserahkan Oleh,

WENDA
WENDA
Direktur

CV. MUDA RIAJL LINTAS SUMATERA SIMPANG NIBUNG
RAWAS, KEC RAWAS ULU KAB. MURATARA**SLIP GAJI****MDR**Nama : MEGIS
Jabatan : SOPIR

NO.	KETERANGAN	JUMLAH
RINCIAN GAJI		
1	Gaji Pokok	3.000.000,-
2	Tunjangan Uang Makan dan Transportasi	1.400.000,-
3	THR	1.000.000,-
	Total	5.400.000,-

Diterima Oleh,

MEGIS
MEGIS
Karyawan

Musi Rawas Utara, 01 APRIL 2023

Diserahkan Oleh,

WENDA
WENDA
Direktur

CV. MUDA RIA

JL LINTAS SUMATERA SIMPANG NIBUNG
 RAWAS, KEC RAWAS ULU KAB. MURATARA

SLIP GAJI**MDR**

Nama : A. RUSDI
 Jabatan : SOPIR

NO.	KETERANGAN	JUMLAH
RINCIAN GAJI		
1	Gaji Pokok	2.700.000,-
2	Tunjangan Uang Makan dan Transportasi	1.400.000,-
3	THR	1.000.000,-
Total		5.100.000,-

Diterima Oleh,

Rusdi
 RUSDI
 Karyawan

Musi Rawas Utara, 01 APRIL 2023
 Diserahkan Oleh,

Widia
 WIDIA
 Direktur


CV. MUDA RIA

JL LINTAS SUMATERA SIMPANG NIBUNG
 RAWAS, KEC RAWAS ULU KAB. MURATARA

SLIP GAJI**MDR**

Nama : ALI
 Jabatan : SOPIR

NO.	KETERANGAN	JUMLAH
RINCIAN GAJI		
1	Gaji Pokok	2.500.000,-
2	Tunjangan Uang Makan dan Transportasi	1.400.000,-
3	THR	1.000.000,-
Total		4.900.000,-

Diterima Oleh,

Ali
 ALI
 Karyawan

Musi Rawas Utara, 01 April 2023
 Diserahkan Oleh,

Widia
 WIDIA
 Direktur

